

**ANALISIS DINAMIKA KEMISKINAN DI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

<b>Nama</b>	<b>: Dian Puspita Sari</b>
<b>NPM</b>	<b>: 2005180049</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ekonomi Pembangunan</b>
<b>Konsentrasi</b>	<b>: Riset Ekonomi dan Bisnis</b>

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 11 Juli 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

**NAMA** : DIAN PUSPITA SARI  
**N P M** : 2005180049  
**PROGRAM STUDI** : EKONOMI PEMBANGUNAN  
**JUDUL TUGAS AKHIR** : ANALISIS DINAMIKA KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

**DINYATAKAN** : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**




**Dr. AMIRUL SYAH, M.Si.**

**Penguji II**



**SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si.**

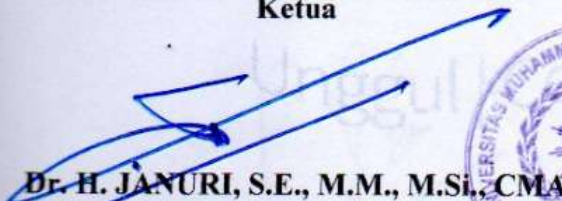
**Pembimbing**



**Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.**

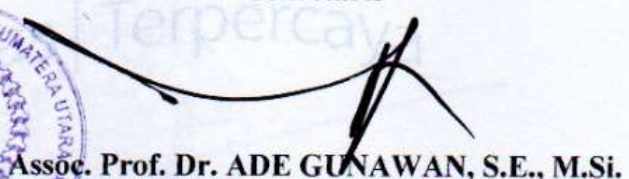
**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA**

**Sekretaris**



**Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DIAN PUSPITA SARI  
N.P.M : 2005180049  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Alamat Rumah : JL. SOEKARNO HATTA PERUMAHAN TAMBANGAN PERMAI  
TEBING TINGGI  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS DINAMIKA KEMISKINAN DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Juni 2025

Pembimbing Tugas Akhir

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Plh Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.



Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : DIAN PUSPITA SARI  
 N.P.M : 2005180049  
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
 Alamat Rumah : JL. SOEKARNO HATTA PERUMAHAN TAMBANGAN PERMAI  
 TEBING TINGGI  
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS DINAMIKA KEMISKINAN DI PROVINSI  
 SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10/3-2025	Bab I, II, III → ok. Bab IV → sudah data		
14/4-2025	- Olah data. - Asumsi klasik, - Prout Model, ekonomi Model.		
15/5-2025	Bab IV → Analisis dan Interpretasi. - Analisis & ekonomi (semissi terintegrasi).		
2/6-2025	Bab IV → ok. Bab V → Grafik, Caption, Daftar pustaka Mandala Bibliografi.		
16/6-2025	Acc tugas akhir utk Sidy		

Medan, Juni 2025  
 Diketahui /Disetujui  
 Plh Program Studi  
 Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Tugas Akhir

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dian Puspita Sari

NPM : 2005180049

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bawah tugas akhir saya yang berjudul “**Analisis Dinamika Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**Yang Menyatakan**

Dian Puspita Sari

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF POVERTY DYNAMICS IN NORTH SUMATRA PROVINCE**

**Dian Puspita Sari**

**Development Economics Study Program**

**Email : [diansaripuspita2805@gmail.com](mailto:diansaripuspita2805@gmail.com)**

Poverty remains a significant challenge in Indonesia's economic development, including in North Sumatra Province. This study aims to analyze the dynamics of poverty and the influencing factors, namely the Open Unemployment Rate (OUR), Life Expectancy (LE), and Mean Years of Schooling (MYS). A quantitative approach is employed using multiple linear regression methods to examine the effect of these independent variables on the poverty rate. Secondary data are obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of North Sumatra for the 2019–2024 period. The results show that the OUR has a positive and significant effect on poverty, indicating that higher unemployment levels tend to increase poverty. LE shows a significant negative effect, meaning that better health outcomes are associated with lower poverty levels. Meanwhile, MYS has a negative but statistically insignificant effect on poverty. These findings highlight that reducing unemployment and improving public health are essential to alleviating poverty in North Sumatra. The study offers important insights for integrated policymaking aimed at enhancing community welfare in a sustainable manner.

**Keywords : Poverty, Open Unemployment Rate, Life Expectancy, Mean Years of Schooling**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DINAMIKA KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Dian Puspita Sari**

**Program Studi Ekonomi Pembangunan**

**Email : [diansaripuspita2805@gmail.com](mailto:diansaripuspita2805@gmail.com)**

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kemiskinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya, yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk menguji pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap tingkat kemiskinan. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara periode 2019–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan pengangguran cenderung meningkatkan kemiskinan. AHH menunjukkan pengaruh negatif signifikan, yang berarti semakin tinggi harapan hidup masyarakat, semakin rendah tingkat kemiskinan. Sementara itu, variabel RLS juga menunjukkan hubungan negatif terhadap kemiskinan, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi kunci penting dalam menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Utara. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan yang terintegrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**Kata Kunci : Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Analisis Dinamika Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Aamiin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat Kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi orang hebat dan kuat selama hidup saya, yang memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.
3. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

5. Ibu Dr Prawidya Hariani RS, selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra Roswita Hafni selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberi arahan kepada saya tentang menulis skripsi ini.
8. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
9. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik.
10. Kepada kedua orang tua saya dan adik-adik saya yang selalu memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan saya serta rekan sekelas masa perkuliahan, dan teman-teman dekat saya yang telah memberi informasi mengenai perkuliahan, dan memberi semangat kepada saya.
12. Kepada teman dekat saya, yang telah memberikan semangat, doa, dukungan dan yang setia menemani saya ketika menulis skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Batasan Penelitian.....	15
1.4 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.....	16
1.4.1 Rumusan Masalah... ..	16
1.4.2 Tujuan Penelitian... ..	16
1.5 Manfaat Penelitian.....	16
1.5.1 Manfaat Akademik... ..	16
1.5.2 Manfaat Non-Akademik... ..	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
2.1 Uraian Teori ... ..	18
2.1.1 Kemiskinan.....	18
2.1.2 Pengangguran.. ..	25
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)... ..	38
2.2 Regulasi Pemerintah... ..	43
2.2.1 Kemiskinan.....	43
2.3 Penelitian Terdahulu... ..	45

2.4 Kerangka Berpikir...	46
2.5 Model Kerangka Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi..	47
2.6 Hipotesis..	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN...</b>	<b>48</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	48
3.2 Definisi Operasional.....	48
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian... ..	49
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	51
3.6.1 Menganalisis ekonomi secara deskriptif tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ... ..	51
3.6.2 Mengestimasi Model Tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.....	54
3.7 Tahapan Analisis.....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara... ..	62
4.1.1 Kondisi Geografi ... ..	62
4.1.2 Kondisi Topografi.....	64
4.1.3 Kondisi Iklim ... ..	65
4.2 Perkembangan Dinamika Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.....	66
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	73

4.4 Mengestimasi Model Ekonometrik Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.....	79
4.4.1 Model Regresi Linier Berganda .....	79
4.5 Uji Hipotesis.....	82
4.5.1 Uji Parsial (Uji t).....	82
4.5.2 Uji F- Statistic Simultan .....	91
4.6 Penaksiran.....	94
4.6.1 Korelasi (R) .....	94
4.6.2 Koefisien Determinasi .....	95
4.7 Pembahasan.....	95
4.7.1 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara .....	95
4.7.2 Pengaruh Angka Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara .....	97
4.7.3 Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara .....	98
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>100</b>
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif – Data Pilar 2 Provinsi Sumatera Utara (2011 – 2023).....	3
Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin Total dan Jumlah Penduduk Miskin Total Provinsi Sumatera Utara (2011-2023).....	4
Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi dan Jumlah Pengangguran Provinsi Sumatera Utara (2019-2024).....	7
Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara (2019-2024).....	10
Tabel 1.5 Komponen Dimensi Kesehatan dan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (2019-2024).....	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Model Ekometrika.....	49
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin Total Provinsi Sumatera Utara (2015- 2024).....	68
Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara (2015-2024).....	69
Tabel 4.3 Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara.....	71
Tabel 4.4 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara.....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Beveridge Pengangguran Struktural.. .....	29
Gambar 2.2 Kurva Beveridge Pengangguran Siklikal.....	31
Gambar 2.3 Kurva Phillips... .....	36
Gambar 2.4 Bagan Konseptual Model.....	46
Gambar 2.5 Kerangka Konseptual Model... .....	47
Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatera Utara... .....	63
Gambar 4.2 Hasil Olah Uji Normalitas... .....	74
Gambar 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas... .....	75
Gambar 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	76
Gambar 4.5 Hasil Uji Autokorelasi... .....	78
Gambar 4.6 Hasil Regresi Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara... ..	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dan beberapa negara di seluruh dunia saat ini masih berjuang dengan masalah kemiskinan serta ketidakadilan ekonomi yang ada, antar individu maupun antar daerah. Dengan jelas, fenomena kemiskinan dan ketidaksetaraan global terlihat dari fakta bahwa 20% dari populasi dunia menikmati lebih dari 70% total pendapatan global, sementara 80% lainnya hanya mendapatkan kurang dari 30% dari pendapatan yang ada. Ketidakadilan dan kemiskinan ini muncul akibat berbagai perbedaan dalam kepemilikan sumber daya serta faktor produksi. Umumnya, wilayah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi akan menikmati tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain yang tidak. (Afriliana & Wahyudi, 2022). Todaro (2003) menyatakan bahwa ketidaksetaraan yang ekstrem dapat menyebabkan berbagai konsekuensi, seperti inefisiensi ekonomi, mengurangi stabilitas sosial dan rasa solidaritas, serta ketidakadilan yang tinggi sering kali dianggap tidak adil. (Todaro, 2003)

Beberapa ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan itu sendiri tidak cukup untuk mengatasi isu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Ini karena pertumbuhan ekonomi sering kali fokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dan kurang memperhatikan aspek penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Akibatnya, pertumbuhan yang terjadi justru bisa meningkatkan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan serta memperlebar kesenjangan pendapatan di antara individu. Eric Maskin, yang meraih Penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun

2007, menegaskan bahwa jika hasil pembangunan diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, hal itu akan mengesampingkan pemerataan dalam masyarakat untuk menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut. (Hariyanto, 2019)

Sejak awal kemerdekaan, fokus pembangunan di Indonesia cenderung pada konsep eksklusif. Pembangunan yang eksklusif ini menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama yang ingin dicapai. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakmerataan dalam kesejahteraan masyarakat, yang terlihat dari tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran dan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Berdasarkan informasi dari BPS, antara tahun 2010 hingga 2019, pengukuran ketidakmerataan pendapatan di tingkat nasional Indonesia berada pada level ketimpangan yang moderat. Oleh karena itu, saat ini diperlukan pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif, yaitu pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan. (Arvianda, 2021)

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia, melalui Bappenas, mengartikan pembangunan ekonomi yang inklusif sebagai suatu pertumbuhan ekonomi yang menyediakan akses dan kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi jurang pemisah antara kelompok dan wilayah. Forum Ekonomi Dunia (WEF) juga mengartikan ekonomi inklusif sebagai suatu pendekatan untuk memperbaiki kinerja ekonomi dengan memperluas peluang dan kesejahteraan, di samping memberikan akses yang merata kepada seluruh masyarakat. Hingga kini, pemerintah telah berkomitmen

untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa depan memperhatikan pembangunan yang inklusif, sehingga tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. (Bestari, 2020)

Pergeseran paradigma pemerintah Indonesia terlihat dari Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No.59 Tahun 2017 mengenai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Poin kedelapan dalam SDGs menetapkan sasaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan, yang dilengkapi dengan penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk seluruh masyarakat. Capaian tersebut dinilai melalui Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). (Irhamsyah, 2020)

**Tabel 1.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif – Data Pilar 2 Provinsi Sumatera Utara (2011 – 2023)**

PROVINSI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023
Sumatera Utara	6,80	6,75	6,52	6,99	6,82	6,86	7,48	7,67	7,72	7,57	7,66	7,82
Indonesia	5,34	5,14	5,17	5,44	5,59	5,78	6,30	6,42	6,57	6,58	6,57	6,61

Sumber: Bappenas, 2024

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) pilar kedua menyajikan indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan (IPPK). Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2024 menunjukkan hasil ketimpangan IPPK di Indonesia. IPPK Sumut pada tahun 2011-2013 mengalami penurunan sebesar 0,28 poin, namun pada tahun 2014-2023 IPPK Sumut mengalami kestabilan dan meningkat sebesar 1,30 poin hingga pada tahun 2023 mencapai angka 7,82. Dengan kata lain rata-rata IPPK Sumut pada tahun 2011-2023 adalah sebesar 7,22 (masuk kedalam kategori memuaskan). Sementara itu, rata-rata IPPK

Indonesia pada tahun yang sama adalah sebesar 5,95 (masuk dalam kategori cukup memuaskan). Hal ini berarti menunjukkan bahwa Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang relatif berhasil dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dibandingkan dengan kondisi rata-rata di Indonesia.

**Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin Total dan Jumlah Penduduk Miskin Total Provinsi Sumatera Utara (2011-2023)**

Tahun (Periode September)	Persentase Penduduk Miskin Total (%)	Jumlah Penduduk Miskin Total (ribu jiwa)
2019	8,63	1.260,00
2020	9,14	1.356,72
2021	8,49	1.273,00
2022	8,33	1.260,00
2023	8,15	1.239,71
2024	7,19	1.110,92

Sumber: [sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id)

Tabel 1.2 diatas memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada akhir tahun yakni data yang tersedia pada bulan September, mulai dari 2021 hingga data terbaru di 2024.

Puncaknya sebelum pandemi, pada September 2019, persentase penduduk miskin mencapai 8,63% dengan jumlah 1.260,00 ribu jiwa, menandai titik terendah dalam periode pra-pandemi yang disajikan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang nyata pada angka kemiskinan. Pada September 2020, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara meningkat menjadi 9,14% dengan jumlah 1.356,72 ribu jiwa, membalikkan tren penurunan yang telah berlangsung.

Setelah lonjakan akibat pandemi, Sumatera Utara menunjukkan pemulihan yang cepat. Pada September 2021, persentase penduduk miskin kembali menurun

menjadi 8,49% dengan jumlah 1.273,00 ribu jiwa. Tren penurunan ini berlanjut pada September 2022, di mana persentase mencapai 8,33% dengan jumlah 1.260,00 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2023 sudah mulai stabil dan turun menjadi 8,15% dengan jumlah 1.239,71 ribu jiwa.

Data terbaru pada tabel menunjukkan penurunan yang sangat drastis pada September 2024, dengan persentase penduduk miskin mencapai 7,19% dan jumlah 1.110,92 ribu jiwa. Angka ini merupakan yang terendah dalam seluruh periode yang disajikan dalam tabel, menunjukkan kemajuan substansial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Tingkat kemiskinan yang rendah ini dapat diartikan sebagai indikator keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam persentase dan jumlah penduduk miskin selama periode ini. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan 2020 serta menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19.

Angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia merupakan dua indikator makroekonomi yang menunjukkan adanya tantangan struktural dalam pembangunan nasional. Makroekonomi adalah ukuran atau data statistik yang digunakan untuk menilai kesehatan dan kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah secara keseluruhan. (Pemerintah Kota Depok, 2021)

Kemiskinan dan pengangguran memiliki keterkaitan yang kompleks dan bersifat kausal (hubungan sebab akibat) yang dimana tingginya tingkat

pengangguran secara langsung memangkas pendapatan rumah tangga, mendorong mereka ke jurang kemiskinan, sementara kemiskinan itu sendiri membatasi akses pada pendidikan dan pelatihan berkualitas, mempersempit peluang individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan yang menghambat mobilitas sosial-ekonomi dan menuntut intervensi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana disimpulkan dalam berbagai penelitian yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. (Putra, 2019)

Data pengangguran mencerminkan kesehatan pasar kerja dan stabilitas ekonomi suatu wilayah. Angka ini tidak hanya mengukur jumlah individu yang tidak memiliki pekerjaan namun secara aktif mencari pekerjaan, tetapi juga memberikan gambaran tentang kapasitas ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai. Hal ini terlihat jelas saat pandemi COVID-19, di mana lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 bersamaan dengan peningkatan persentase penduduk miskin, menunjukkan kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Namun, seiring dengan pemulihan TPT pasca-pandemi, persentase kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan yang positif, menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengurangi pengangguran adalah kunci fundamental untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Provinsi Sumatera Utara.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara luas diakui sebagai salah satu metrik utama yang digunakan secara global dan nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai rasio antara jumlah penduduk yang

menganggur dengan total angkatan kerja, yang dinyatakan dalam persentase. Ini mengukur proporsi tenaga kerja aktif yang tidak dapat menemukan pekerjaan. Sementara itu, Jumlah Pengangguran merujuk pada hitungan absolut individu yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi saat ini tidak memiliki pekerjaan. Angkatan Kerja mencakup semua individu berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja atau sedang mencari pekerjaan, merepresentasikan total pasokan tenaga kerja yang tersedia dan bersedia di dalam perekonomian. (Badan Pusat Statistik, 2024)

**Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Pengangguran Provinsi Sumatera Utara (2019-2024)**

Tahun (Periode Agustus)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Jumlah Angkatan Kerja (ribu orang)	Jumlah Pengangguran (ribu orang)
2019	5.41	7,06	381.986
2020	6.91	7,35	507.885
2021	6.33	7,511	475.556
2022	6.16	7,67	472.272
2023	5.89	8,022	472.508
2024	5.60	8,181	458.136

Sumber: [sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id)

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2019-2024, terutama dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Pada Agustus 2019, TPT berada pada 5,41%. Angka ini berfungsi sebagai titik dasar yang penting,

merepresentasikan situasi pengangguran di provinsi tersebut tepat sebelum gangguan ekonomi global yang substansial.

Dampak pandemi COVID-19 terlihat jelas pada Agustus 2020, ketika TPT melonjak tajam menjadi 6,91%. Peningkatan drastis ini secara langsung disebabkan oleh kontraksi ekonomi yang meluas, penutupan bisnis, dan penurunan permintaan yang dipicu oleh fase awal pandemi. Tren ini mencerminkan pola nasional, di mana pandemi menyebabkan hilangnya pekerjaan yang signifikan dan perlambatan aktivitas ekonomi. Namun, periode pasca-pandemi (2021-2024) menunjukkan pemulihan yang konsisten dan menggembirakan. TPT Sumatera Utara secara bertahap menurun menjadi 6,33% pada 2021, 6,16% pada 2022, 5,89% pada 2023, dan akhirnya mencapai 5,60% pada 2024. Penurunan yang berkelanjutan ini menandakan pemulihan yang kuat di pasar kerja provinsi, dengan aktivitas ekonomi secara bertahap kembali normal dan beradaptasi dengan lingkungan "normal baru". Yang patut diperhatikan, TPT tahun 2024 sangat mendekati tingkat pra-pandemi tahun 2019, menunjukkan kembalinya stabilitas pasar kerja yang signifikan.

Jumlah absolut pengangguran di Sumatera Utara mencapai puncaknya pada Agustus 2020, dengan sekitar 507.885 ribu orang, berkorelasi langsung dengan TPT tertinggi selama periode tersebut. Ini menunjukkan skala langsung dari dampak pandemi terhadap ketersediaan pekerjaan.

Meskipun TPT menunjukkan penurunan yang konsisten setelah tahun 2020, pengurangan dalam jumlah pengangguran tidak selalu setajam atau selinier persentasenya. Sebagai contoh, antara Agustus 2022 dan Agustus 2023, TPT menurun dari 6,16% menjadi 5,89%, namun jumlah pengangguran relatif stabil

(dari 472.272 ribu menjadi 472.508 ribu). Fenomena ini terutama dijelaskan oleh pertumbuhan angkatan kerja (Angkatan Kerja) yang terjadi secara bersamaan. Angkatan kerja terus bertambah, dari sekitar 7,06 juta orang pada 2019 menjadi 8,181 juta orang pada 2024. Ini berarti bahwa meskipun perekonomian berhasil menyerap sebagian besar pencari kerja baru, jumlah total orang yang membutuhkan pekerjaan tetap tinggi karena adanya penambahan populasi usia produktif yang memasuki pasar kerja.

Penurunan TPT yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024 secara tegas menunjukkan peningkatan efisiensi pasar kerja Sumatera Utara dalam menyerap pekerja yang tersedia relatif terhadap ukurannya. Namun, pengurangan yang seringkali kurang jelas, atau bahkan fluktuasi kecil, dalam jumlah absolut individu yang menganggur, terutama pada tahun-tahun yang ditandai dengan pertumbuhan angkatan kerja yang signifikan, menyoroti dinamika mendasar yang penting. Ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi pengangguran menyusut, perekonomian menghadapi tantangan berkelanjutan dan substansial dalam menciptakan lapangan kerja baru yang cukup tidak hanya untuk mengurangi pengangguran yang ada tetapi juga untuk mengakomodasi masuknya pencari kerja baru secara stabil.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau yang dikenal secara internasional sebagai Human Development Index (HDI), merupakan metrik komposit yang diakui secara global untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia suatu negara atau wilayah. Berbeda dengan indikator ekonomi semata, IPM memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup penduduk dengan mempertimbangkan aspek-aspek fundamental yang membentuk kapabilitas manusia. IPM dirancang khusus untuk menggeser fokus dari statistik ekonomi

tradisional, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), menuju hasil-hasil pembangunan yang berpusat pada manusia. Hal ini menekankan bahwa manusia dan kapabilitas mereka adalah kriteria utama dalam menilai pembangunan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. (World Health Organization, n.d.)

**Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara (2019-2024)**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,74	71,77	72	72,71	75,13	75,76

Sumber: Badan Pusat Statistik (olah data)

Terlihat dari tabel 1.4 bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun selama periode 2019-2024. Nilai IPM meningkat secara progresif dari 71,74 pada tahun 2019 menjadi 75,76 pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan kumulatif sebesar 4,02 poin dalam kurun waktu lima tahun.

Laju peningkatan IPM bervariasi setiap tahunnya. Dari 2019 ke 2020, IPM meningkat sangat tipis, hanya 0,03 poin (dari 71,74 menjadi 71,77). Pada periode 2020 ke 2021, peningkatan sedikit membaik menjadi 0,23 poin (dari 71,77 menjadi 72,00). Antara 2021 dan 2022, laju peningkatan mulai menunjukkan percepatan, mencapai 0,71 poin (dari 72,00 menjadi 72,71). Peningkatan paling signifikan dan dramatis terjadi antara tahun 2022 dan 2023, dengan lonjakan sebesar 2,42 poin (dari 72,71 menjadi 75,13). Pada tahun terakhir yang tercatat,

dari 2023 ke 2024, peningkatan IPM kembali moderat sebesar 0,63 poin (dari 75,13 menjadi 75,76).

Periode 2019-2024 secara langsung mencakup masa pandemi global COVID-19, yang mulai berdampak signifikan pada masyarakat di awal tahun 2020. Tren yang diamati, yaitu pertumbuhan IPM yang sangat lambat dari 2019 ke 2020 dan peningkatan yang sedikit lebih baik namun masih sederhana dari 2020 ke 2021, sangat mengindikasikan dampak buruk pandemi. Dampak ini kemungkinan besar termanifestasi sebagai gangguan pada layanan kesehatan (mempengaruhi angka harapan hidup), penutupan sekolah dan hilangnya pembelajaran (mempengaruhi pendidikan), serta kemerosotan ekonomi (mempengaruhi pendapatan). Namun, percepatan luar biasa dalam pertumbuhan IPM dari 2022 ke 2023 menunjukkan pemulihan yang kuat dan kemungkinan besar merupakan hasil dari respons kebijakan yang efektif yang diimplementasikan selama dan segera setelah puncak pandemi. Hal ini menunjukkan kapasitas ketahanan masyarakat yang kuat dan keberhasilan implementasi strategi pemulihan yang mampu menggerakkan kembali kemajuan dalam dimensi-dimensi pembangunan manusia.

Keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas hidup, khususnya dalam dimensi kesehatan dan pendidikan, sangatlah erat. Data menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga miskin di Sumatera Utara memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian besar kepala rumah tangga miskin di Sumatera Utara hanya menamatkan pendidikan setingkat SMA (26,99%) atau bahkan SD (26,21%), dengan rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga hanya 7,37 tahun. Angka rata-rata lama sekolah yang rendah ini, yang mengindikasikan

pendidikan yang belum tuntas hingga jenjang SMP, menunjukkan adanya korelasi kuat antara pendidikan dan status kemiskinan. (Katadata, 2023)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit atau ringkasan yang mengukur keberhasilan suatu wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dalam konteks fokus pada kesehatan dan pendidikan, dua dimensi krusial yang membentuk IPM adalah Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) yang mencerminkan kesehatan dan panjangnya usia penduduk, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menunjukkan tingkat Pendidikan.

AHH mengindikasikan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani oleh seseorang jika pola mortalitas saat ini tetap berlaku sepanjang hidupnya. Peningkatan AHH menunjukkan perbaikan dalam sistem kesehatan, gizi, dan sanitasi. Rata-rata Lama Sekolah (RLS), mengukur rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS menunjukkan tingkat pendidikan aktual yang dicapai oleh populasi dewasa. (Badan Pusat Statistik, 2021)

**Tabel 1.5 Komponen Dimensi Kesehatan dan Pendidikan  
Provinsi Sumatera Utara  
(2019-2024)**

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)
2019	68,95	9,56
2020	73	9,71
2021	73,1	9,88
2022	73,39	10,02
2023	73,67	10,04
2024	68,36	10,09

Sumber: databoks.katadata.co.id

Data pada tabel 1.5 menunjukkan data Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan pola fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan di sebagian besar periode observasi, namun diakhiri dengan penurunan signifikan pada tahun terakhir. Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu berapa lama rata-rata orang diharapkan bisa hidup. Di tahun 2019, angkanya 68,95 tahun. Lalu, ada peningkatan besar di tahun 2020 menjadi 73 tahun. Angka ini terus naik perlahan sampai puncaknya di tahun 2023 menjadi 73,67 tahun. Ini kabar baik, artinya kesehatan masyarakat membaik. Namun, yang jadi perhatian adalah di tahun 2024, angka ini tiba-tiba turun drastis ke 68,36 tahun. Penurunan drastis seperti ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara sedang menghadapi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan penduduknya.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang menunjukkan berapa tahun rata-rata orang bersekolah. Di tahun 2019, angkanya 9,56 tahun. Kabar baiknya, angka ini terus naik secara konsisten setiap tahunnya. Di tahun 2022, RLS sudah mencapai 10,02 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Sumatera Utara sudah menyelesaikan pendidikan setara SMA. Kenaikan ini berlanjut terus hingga tahun 2024 mencapai 10,09 tahun. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menempuh pendidikan lebih lama, yang tentu bagus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara. Hal ini penting karena peningkatan RLS berhubungan positif dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar kepala rumah tangga miskin di Sumatera Utara hanya memiliki pendidikan dasar atau menengah, yang memperkuat hubungan antara kemiskinan dan pendidikan. Meskipun demikian, IPM nasional menunjukkan peningkatan yang seimbang di semua dimensinya, termasuk kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah), yang dapat menjadi tolak ukur bagi provinsi. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Analisis Dinamika Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis akan mengangkat beberapa permasalahan yang ada didalam penelitian ini, yaitu :

1. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara terus menurun dari tahun 2020 hingga 2024, namun penciptaan lapangan kerja belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahunnya.
2. Keterbatasan akses dan keberhasilan pendidikan pada masa lalu yang masih membebani kualitas SDM saat ini, yang berimplikasi pada produktivitas tenaga kerja dan peluang ekonomi.
3. Kemiskinan tetap menjadi isu penting karena masih terdapat lebih dari satu juta penduduk miskin di Sumatera Utara, dan fluktuasi ekonomi global tetap menjadi ancaman terhadap kestabilan ini.
4. Angka Harapan Hidup (AHH) sempat meningkat tajam dari 73 tahun (2020) menjadi 73,67 tahun (2023), namun menurun lagi menjadi 68,36 tahun (2024). Meskipun tetap berada pada level tinggi, penurunan ini mengindikasikan potensi kerentanan dalam sistem kesehatan atau ketidakkonsistenan kualitas layanan kesehatan jangka panjang di Sumatera Utara.

## 1.3 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini batasan penelitian difokuskan pada peran tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesehatan (AHH) dan tingkat pendidikan (RLS), dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.

## **1.4 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan dinamika tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara ?

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis ekonomi secara deskriptif tentang tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara
2. Mengestimasi model ekonometrik tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan pembaca yang berkepentingan dengan dunia di sektor ekonomi dapat bermanfaat. Manfaat yang dapat diambil antaranya :

### **1.5.1 Manfaat Akademik**

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan dijadikan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan ekonomi pembangunan, fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Manfaat akademik sebagai bahan kajian dan literatur bagi civitas akademik dalam mencari peran pengangguran, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.

### **1.5.2 Manfaat Non-Akademik**

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengangguran, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dengan tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi stakeholder, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang tingkat pengangguran terbuka, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dengan tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

Kemiskinan diakui sebagai permasalahan fundamental dalam proses pembangunan di sebagian besar negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena ini telah lama ada dan diperkirakan akan terus menjadi tantangan, timbul akibat perbedaan kemampuan, kesempatan, dan akses terhadap sumber daya. Meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah Indonesia, termasuk penetapan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan (Bappenas, 2020). Masalah ini masih menjadi isu yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga merupakan tantangan sosial dan pembangunan yang kompleks, bersifat persisten, dan memerlukan pendekatan multidimensional. Berbagai definisi, penyebab, dan dampak kemiskinan yang saling terkait menegaskan bahwa penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap akar masalahnya. (Rahayu, 2019; Todaro & Smith, 2015).

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketidakmampuan ini dicirikan oleh pendapatan rendah yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, serta akses terhadap standar kesehatan dan pendidikan. Sumber ini membedakan antara kemiskinan relatif, yang terjadi akibat kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga menyebabkan ketimpangan

pendapatan, dan kemiskinan absolut, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diukur dengan garis kemiskinan finansial. (Hajra, 2022)

Menurut UU No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosio-ekonomi di mana seseorang atau kelompok tidak dapat memenuhi hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar ini mencakup pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, lingkungan, keamanan dari kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Lebih lanjut, Kementerian Sosial RI melalui Permensos No. 146/HUK/2013 menguraikan kriteria spesifik untuk mengidentifikasi fakir miskin. Kriteria ini mencakup ketiadaan sumber penghidupan atau sumber penghidupan yang tidak mencukupi, pengeluaran dominan untuk makanan pokok sederhana, kesulitan berobat kecuali di fasilitas kesehatan publik atau subsidi pemerintah, ketidakmampuan membeli pakaian baru setahun sekali, pendidikan anak hanya sampai jenjang SMP, kualitas rumah yang buruk (dinding, lantai, atap), sumber penerangan non-listrik atau listrik tanpa meteran, luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi per orang, dan sumber air minum yang tidak terlindungi.

Pola pengeluaran rumah tangga miskin tidak hanya mencerminkan kekurangan pendapatan, tetapi juga menunjukkan prioritas pengeluaran yang sangat terbatas, di mana pengeluaran konsumsi dasar seperti pangan mendominasi keseluruhan anggaran, sedangkan pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan investasi masa depan sangat minim (Hasibuan, 2016). Namun, pendekatan pembangunan awal yang berasumsi pertumbuhan ekonomi akan otomatis

meningkatkan standar hidup seringkali justru meningkatkan ketimpangan. Pendekatan lain meliputi pertumbuhan, ketergantungan, ekuitas, dan kebutuhan dasar. Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai strategi pengurangan kemiskinan, melalui investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, juga sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **a. Konsep Terintegrasi Chambers (Lima Dimensi Kemiskinan)**

Konsep Chambers ini sangat penting karena memperluas definisi kemiskinan dari sekadar kekurangan materi menjadi kerangka multidimensional yang mencakup aspek sosial, psikologis, dan geografis. Ini menggarisbawahi bahwa kemiskinan adalah fenomena yang saling terkait dan memperparah diri (Chambers, 1983). Chambers melihat kemiskinan sebagai "konsep terintegrasi" dengan lima dimensi yaitu:

1. Kemiskinan (Proper): Ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, berlaku baik bagi mereka yang tidak berpenghasilan maupun yang berpenghasilan tidak cukup.
2. Ketidakberdayaan (Powerless): Pendapatan rendah seringkali menyebabkan berkurangnya kekuatan sosial, terutama dalam memperoleh keadilan atau hak yang sama untuk penghidupan yang manusiawi.
3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency): Individu atau kelompok miskin tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk menghadapi situasi tak terduga yang memerlukan alokasi pendapatan, seperti bencana alam atau biaya pengobatan yang mahal.

4. Ketergantungan (dependency): Keterbatasan pendapatan dan kekuatan sosial menyebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada pihak lain, sehingga sulit menciptakan solusi atau sumber pendapatan baru secara mandiri.
5. Keterasingan (Isolation): Dimensi ini menyoroti peran lokasi, di mana orang yang tinggal jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi (misalnya, daerah pedesaan atau terpencil) memiliki standar hidup yang lebih rendah karena akses terbatas ke fasilitas kesejahteraan yang terkonsentrasi di daerah perkotaan.

#### **b. Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan (Poverty Trap)**

Bagian ini menjelaskan bagaimana kemiskinan, berdasarkan konsep Chambers, menjadi kondisi yang saling memperkuat di banyak negara berkembang. Pendapatan yang terbatas menyebabkan daya beli yang rendah untuk kebutuhan dasar, khususnya nutrisi dan standar kesehatan. Hal ini berakibat pada pasokan makanan yang tidak cukup, kesehatan yang buruk, risiko gizi buruk, penyakit menular, dan tingkat kematian yang tinggi. Kondisi kesehatan yang buruk dan tingkat kematian yang tinggi kemudian menyebabkan partisipasi sosial yang rendah, peningkatan ketidakhadiran dalam kegiatan sosial dan pekerjaan, tingkat kecerdasan yang rendah, dan keterampilan yang rendah, sehingga lingkaran kemiskinan terus berlanjut (Wini, 2010).

### c. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Kemiskinan multidimensional merupakan bentuk kemiskinan yang tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga mencakup kekurangan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan standar hidup secara keseluruhan. Dalam pendekatan ini, seseorang dianggap miskin jika ia mengalami kekurangan di beberapa indikator dasar sekaligus, seperti tidak bersekolah, tidak memiliki akses air bersih, atau gizi buruk. Konsep ini diperkenalkan dan diukur secara resmi melalui Multidimensional Poverty Index (MPI), yang dikembangkan oleh UNDP sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan pengukuran kemiskinan yang hanya berbasis pendapatan (UNDP, 2010)

1. Kemiskinan Absolut: Kondisi di mana pendapatan berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk kualitas hidup.
2. Kemiskinan Relatif: Terjadi akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata, menciptakan kesenjangan pendapatan atau standar kesejahteraan.
3. Kemiskinan Kultural: Hasil dari sikap dan kebiasaan yang berakar pada budaya atau adat istiadat yang menolak metode modern untuk meningkatkan standar hidup, seperti kemalasan, pemborosan, kurangnya kreativitas, dan ketergantungan pada pihak lain.
4. Kemiskinan Struktural: Disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya, seringkali dalam struktur sosial atau politik yang tidak mendukung pengentasan kemiskinan, dan kadang-kadang melibatkan diskriminasi.

Kemiskinan berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah timbul karena faktor geografis, kelangkaan sumber daya, atau minimnya infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik. Sementara itu, kemiskinan buatan muncul akibat proses pembangunan yang tidak inklusif, di mana hasil pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga menciptakan ketimpangan akses dan kesejahteraan (Bappenas, 2020)

1. Kemiskinan Alamiah: Timbul dari kelangkaan sumber daya alam, kurangnya infrastruktur publik (jalan, listrik, air bersih), dan tanah yang tidak subur, biasanya ditemukan di daerah terbelakang yang belum tersentuh kebijakan pembangunan.
2. Kemiskinan Buatan: Disebabkan oleh modernisasi atau sistem pembangunan yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya, fasilitas ekonomi, dan peluang. Ini adalah dampak negatif dari developmentalism, di mana pengejaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan distribusi hasil pembangunan yang tidak merata (misalnya, industri lebih diuntungkan daripada pertanian).

#### **d. Indikator Kemiskinan**

Pengukuran kemiskinan secara tradisional mengandalkan pendapatan dan pengeluaran rata-rata. Namun, pendekatan multidimensi memperluas cakupan tersebut dengan memasukkan indikator sosial, seperti jumlah individu yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta kondisi kehidupan yang layak. Indikator-indikator ini mencerminkan dimensi ekonomi, sosial, dan

peran negara dalam pembangunan. Dimensi ekonomi meliputi Pendapatan Per Kapita dan Garis Kemiskinan. Dimensi peran pemerintah mencakup besarnya investasi di sektor sumber daya manusia dan infrastruktur. Sementara itu, dimensi kesehatan menilai kualitas pelayanan kesehatan, akses air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Seluruh pendekatan ini digunakan dalam Multidimensional Poverty Index (MPI) sebagai alat ukur resmi kemiskinan non-moneter yang dikembangkan oleh UNDP (2010).

- 1) Dimensi Ekonomi: Pendapatan Per Kapita (rata-rata pendapatan, mencerminkan distribusi pendapatan) dan Garis Kemiskinan (rata-rata pengeluaran per kapita untuk kebutuhan dasar).
- 2) Dimensi Peran Pemerintah: Investasi Pemerintah di Bidang Sumber Daya Manusia (pendidikan, agama, kesehatan) dan Investasi Pemerintah di Bidang Fisik (pembangunan infrastruktur).
- 3) Dimensi Kesehatan: Kualitas kesehatan publik, akses air bersih, akses fasilitas kesehatan.

#### **e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin**

Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan keterkaitan yang erat antara indikator makroekonomi dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Temuan mereka menyatakan bahwa variabel seperti PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) secara simultan memengaruhi distribusi

kemiskinan, sehingga strategi penanggulangan memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, pendidikan, dan ketimpangan sosial (Rahayu & Febriaty, 2021) .

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita: Dapat mencerminkan kemampuan kawasan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, tanpa pemerataan pendapatan, peningkatan PDRB tidak otomatis menurunkan jumlah penduduk miskin.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka: Semakin tinggi TPT, semakin banyak masyarakat tidak bekerja produktif, sehingga risiko kemiskinan meningkat.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): mencakup pendidikan, kesehatan, dan pendapatan di mana peningkatan IPM terbukti memiliki efek negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

### **2.1.2 Pengangguran**

Dari perspektif ekonomi yang lebih luas, pengangguran merupakan pemborosan sumber daya ekonomi yang berharga. Individu yang menganggur memiliki potensi untuk berkontribusi pada pendapatan nasional melalui produksi barang dan jasa, namun potensi tersebut tidak termanfaatkan. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Pengangguran yang berlanjut juga dapat memicu gangguan keamanan, sosial, dan politik, yang pada gilirannya mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Konsekuensi akhirnya dapat berupa

penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita suatu negara. (Edo, 2021)

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja. Definisi ini juga mencakup individu yang bekerja kurang dari dua hari dalam satu minggu sebelum pencacahan. (Hidayatulloh, 2015)

Secara umum, pengangguran, atau sering disebut juga tunakarya, adalah istilah yang diberikan kepada individu yang tidak bekerja sama sekali, sedang aktif mencari pekerjaan, atau sedang berusaha untuk memulai suatu usaha baru. Kondisi pengangguran umumnya terjadi ketika jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia yang mampu menyerap mereka. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan fundamental antara penawaran dan permintaan tenaga kerja (BPS, 2016).

Angkatan kerja mencakup populasi dewasa yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, yang terdiri dari kelompok bekerja dan kelompok menganggur. Batasan usia yang umumnya digunakan untuk menggolongkan penduduk sebagai angkatan kerja adalah antara 15 hingga 64 tahun (BPS, 2024).

Dalam menganalisis pengangguran, yang selalu menjadi perhatian utama bukanlah jumlah absolut individu yang menganggur, melainkan tingkat pengangguran yang dinyatakan dalam bentuk persentase dari total angkatan kerja. Pergeseran fokus dari jumlah absolut ke tingkat pengangguran menunjukkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang kesehatan pasar tenaga kerja relatif

terhadap total tenaga kerja yang tersedia. Jumlah penganggur yang besar mungkin tidak seburuk jika angkatan kerjanya juga sangat besar, dibandingkan dengan jumlah penganggur yang lebih kecil tetapi dalam angkatan kerja yang sangat terbatas (OECD & ILO, dalam definisi standar internasional).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah formula yang digunakan untuk melihat aksesibilitas pekerja (kesempatan kerja), yang didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dari sejumlah angkatan kerja. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya pada tingkat pengangguran, karena ini menyediakan metrik terstandarisasi untuk perbandingan dari waktu ke waktu dan antar wilayah (BPS, 2021).

Pengangguran dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: pengangguran sukarela dan pengangguran terpaksa. Pengangguran sukarela (voluntary unemployment) mengacu pada individu atau kelompok yang memilih untuk tidak bekerja daripada menerima pekerjaan dengan gaji di bawah standar yang mereka inginkan. Jenis pengangguran ini seringkali merupakan bagian dari proses pencarian pekerjaan yang optimal, di mana individu secara strategis menunggu kesempatan yang lebih sesuai dengan kualifikasi atau ekspektasi upah mereka. Sebaliknya, pengangguran terpaksa (involuntary unemployment) merujuk pada individu atau kelompok yang tidak mendapatkan pekerjaan meskipun mereka bersedia menerima pekerjaan bahkan dengan gaji yang cenderung rendah dari seharusnya (Sitohang, 2015). Pengangguran sukarela, yang sering dikaitkan

dengan pengangguran friksional, menunjukkan bahwa individu sedang mengoptimalkan pencarian kerja mereka. Namun, pengangguran terpaksa menunjuk pada kegagalan pasar yang lebih dalam di mana pekerja yang bersedia tidak dapat menemukan pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan *laissez-faire* mungkin dapat dirasionalisasi untuk pengangguran sukarela, tetapi pengangguran terpaksa menuntut intervensi pemerintah, seperti stimulus sisi permintaan atau reformasi struktural, untuk mengoreksi ketidakseimbangan pasar. (Hayes et al., 2025)

#### **a. Klasifikasi Pengangguran Berdasarkan Penyebab dan Karakteristik**

Pengangguran merupakan fenomena kompleks dalam ekonomi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab serta karakteristiknya. Pemahaman terhadap klasifikasi ini penting untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran, karena setiap jenis pengangguran memiliki akar masalah dan pendekatan penanganan yang berbeda. Klasifikasi ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja sekaligus tantangan struktural dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Berikut beberapa klasifikasi pengangguran berdasarkan penyebab dan karakteristik (Tuwajira, 2021).

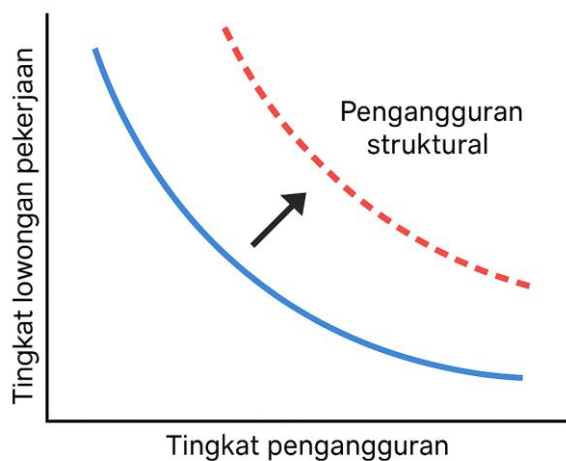
##### **1) Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment)**

Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja yang ada. Pengangguran friksional dianggap sebagai hasil alami dari fakta bahwa proses pasar membutuhkan waktu dan informasi dapat menjadi mahal. Bahkan dalam perekonomian yang stabil dan tumbuh, pengangguran

friksional secara alami terjadi karena pekerja berpindah pekerjaan, mencari peluang yang lebih baik, atau baru memasuki pasar kerja.

## 2) Pengangguran Struktural (Structural Unemployment)

Pengangguran struktural terjadi karena adanya problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur ekonomi semacam ini memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, sementara pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut. Fenomena ini sering disebut sebagai ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch). Penyebabnya bisa meliputi kemajuan teknologi yang membuat pekerjaan tertentu tidak lagi dibutuhkan (dikenal sebagai pengangguran teknologi), kurangnya keterampilan yang relevan di pasar, atau perpindahan pekerjaan ke negara lain.



**Gambar 2.1 Kurva Beveridge Pengangguran Struktural**

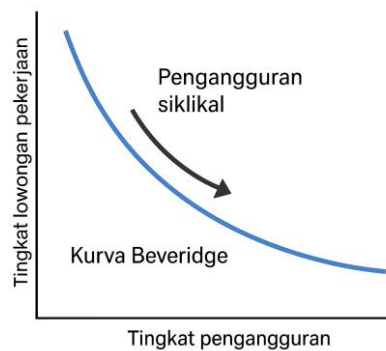
Kurva Beveridge menggambarkan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat lowongan pekerjaan. Kurva biru menunjukkan hubungan normal semakin banyak lowongan, semakin rendah pengangguran, kurva merah

(bergeser ke kanan atas) adalah pengangguran struktural yang menunjukkan ketidaksesuaian keterampilan dan lokasi. Pergeseran ke kanan atas mengindikasikan bahwa meskipun banyak pekerjaan tersedia, pencari kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai atau berada di lokasi yang salah (Elsby, Michaels, & Ratner, 2015).

Dalam kondisi normal, ketika lowongan pekerjaan naik, pengangguran turun yang menunjukkan kecocokan antara pencari kerja dan lowongan. Namun, dalam pengangguran struktural, kurva ini bergeser ke kanan atas yang menunjukkan bahwa meskipun banyak lowongan tersedia, pengangguran tetap tinggi karena ketidaksesuaian keterampilan. Pengangguran struktural terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Ini bukan disebabkan oleh kurangnya lowongan kerja secara umum, tetapi oleh ketidakcocokan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan keterampilan.

### 3) Pengangguran Siklikal (Konjungtural/Cyclical Unemployment)

Pengangguran siklikal adalah variasi dalam jumlah pekerja yang menganggur selama pasang surut ekonomi, seperti yang terkait dengan perubahan siklus bisnis atau periode resesi. Tingkat pengangguran ini cenderung meningkat selama periode resesi ekonomi dan menurun selama periode pertumbuhan ekonomi. Jenis pengangguran ini terjadi karena kelebihan pengangguran alami dan merupakan hasil dari penurunan permintaan agregat dalam perekonomian.



**Gambar 2.2 Kurva Beveridge Pengangguran Siklikal**

Kurva Beveridge menggambarkan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat lowongan pekerjaan. Dalam konteks pengangguran siklikal, terjadi pergerakan sepanjang kurva ke arah kanan bawah saat ekonomi melemah, dan ke kiri atas saat ekonomi membaik. Kurva biru, kurva Beveridge menunjukkan hubungan negatif antara pengangguran dan lowongan kerja. Panah hitam (arah melengkung ke bawah) menunjukkan pengangguran siklikal saat terjadi resesi lowongan menurun dan pengangguran meningkat. Makna pergerakan sepanjang kurva adalah ketika ekonomi memburuk atau membaik, posisi ekonomi bergerak di sepanjang kurva, bukan keluar dari kurva. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral dapat secara aktif melakukan intervensi (misalnya, melalui penyesuaian suku bunga atau pengeluaran pemerintah) untuk mengurangi pengangguran siklikal dan menstabilkan ekonomi (Elsby, Michaels, & Ratner, 2015).

#### 4) Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment)

Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang mempengaruhi tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Jenis pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian dan perikanan, di mana

aktivitas kerja sangat bergantung pada siklus alam atau musim panen/tangkap. Pengangguran musiman menyoroti kerentanan sektor-sektor tertentu terhadap siklus alam, yang memerlukan strategi diversifikasi atau pendapatan tambahan. Meskipun dapat diprediksi, jenis pengangguran ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan yang signifikan bagi pekerja yang terkena dampak. Kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi promosi pekerjaan di luar musim, penyediaan dukungan pendapatan musiman, atau mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi di wilayah yang terkena dampak.

#### 5) Pengangguran Terbuka (Open Unemployment)

Pengangguran terbuka mengacu pada individu yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Jenis pengangguran ini seringkali merupakan akibat dari peningkatan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan angkatan kerja, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Menurut BPS, pengangguran terbuka mencakup penduduk yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

#### 6) Pengangguran Tersembunyi (Hidden Unemployment)

Pengangguran tersembunyi menggambarkan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena berbagai alasan. Salah satu contohnya adalah perusahaan kecil yang memiliki terlalu banyak pekerja sehingga operasi mereka menjadi tidak efisien. Dalam situasi ini, kelebihan tenaga kerja yang

digunakan diklasifikasikan sebagai pengangguran tersembunyi. Jenis pengangguran ini juga dapat terjadi apabila penambahan tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan produksi yang berarti.

#### 7) Setengah Menganggur (Underemployment)

Setengah menganggur adalah pekerja yang tidak bekerja secara optimal karena kurangnya kesempatan kerja yang penuh. Pekerja dalam kategori ini biasanya bekerja kurang dari 35 jam seminggu, atau mungkin hanya satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Ada juga kategori "setengah pengangguran parah" yang merujuk pada mereka yang bekerja kurang dari 25 jam per minggu. Setengah menganggur menunjukkan dimensi kualitatif dari pengangguran, di mana individu dipekerjakan tetapi tidak pada kapasitas penuh atau keinginan mereka.

#### 8) Pengangguran Institusional (Institutional Unemployment)

Pengangguran institusional adalah hasil dari faktor dan insentif institusional jangka panjang atau permanen dalam perekonomian. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada pengangguran institusional meliputi kebijakan pemerintah, seperti penetapan upah minimum yang tinggi, program jaminan sosial yang murah hati, dan undang-undang lisensi okupasi yang restriktif. Fenomena pasar tenaga kerja seperti upah efisiensi (efficiency wages) dan praktik diskriminasi dalam perekrutan juga dapat menjadi penyebabnya. Institusi pasar tenaga kerja, seperti tingkat serikat pekerja yang tinggi, juga dapat berkontribusi pada jenis pengangguran ini.

## **b. Teori-Teori Ekonomi tentang Pengangguran**

Berbagai teori ekonomi telah dikembangkan untuk menjelaskan fenomena pengangguran, masing-masing dengan asumsi dan implikasi kebijakan yang berbeda.

### **1. Teori Klasik**

Pandangan teori Klasik menyatakan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga pasar bebas. Teori ini meyakini bahwa pasar memiliki kemampuan untuk menjamin terciptanya permintaan yang dapat menyerap semua penawaran tenaga kerja. Ekonom Klasik berpendapat bahwa pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara, yang pada akhirnya akan teratasi melalui penyesuaian mekanisme pasar. Pandangan Klasik ini menekankan pasar yang dapat mengoreksi diri sendiri, menyiratkan intervensi pemerintah yang minimal. Teori ini akan menganjurkan kebijakan yang menghilangkan kekakuan pasar, seperti undang-undang upah minimum atau kekuatan serikat pekerja, untuk memungkinkan upah dan harga menyesuaikan diri secara bebas, sehingga membersihkan pasar tenaga kerja.

### **2. Teori Keynesian**

Berbeda secara fundamental dari Teori Klasik, pandangan Keynes (1936) menyatakan bahwa masalah pengangguran timbul terutama karena rendahnya permintaan agregat. Menurut Keynes, bukan rendahnya produksi, melainkan rendahnya konsumsi yang menyebabkan

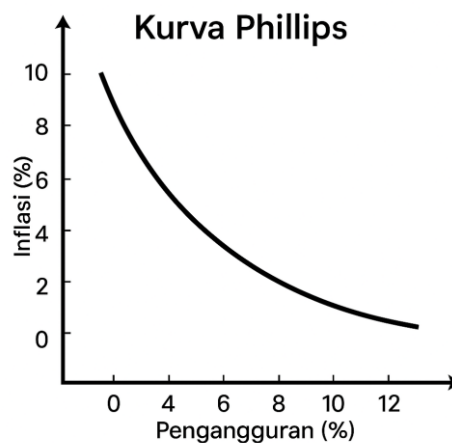
terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan, akibatnya, pengangguran. Keynes berpendapat bahwa masalah pengangguran tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas, karena dalam kenyataannya, upah cenderung kaku dan sulit untuk menurun. Apabila angkatan kerja meningkat, penurunan upah yang terjadi akan berdampak negatif karena mengurangi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan produsen menderita kerugian dan tidak mampu menyerap kelebihan tenaga kerja.

Teori Keynesian secara fundamental menggeser fokus dari kegagalan pasar sisi penawaran ke defisiensi sisi permintaan, yang melegitimasi intervensi pemerintah. Hal ini secara langsung menantang gagasan Klasik tentang pasar yang dapat mengoreksi diri sendiri, terutama mengingat kekakuan upah. Oleh karena itu, teori ini menyediakan dasar teoritis untuk kebijakan manajemen permintaan (stimulus fiskal dan moneter) untuk meningkatkan permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja, khususnya selama resesi.

### 3. Kurva Phillips (Phillips Curve)

Teori Kurva Phillips, yang dikemukakan oleh A.W. Phillips, menunjukkan adanya hubungan terbalik antara tingkat kenaikan upah (atau inflasi) dan tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Kurva Phillips memperkenalkan dilema antara inflasi dan pengangguran, yang merupakan dilema utama bagi kebijakan stabilisasi makroekonomi. Ini berarti bahwa upaya untuk mengurangi pengangguran mungkin datang dengan biaya

inflasi yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, bank sentral dan pemerintah menghadapi pilihan kebijakan: memprioritaskan pengangguran rendah atau inflasi rendah. Stabilitas dan validitas hubungan ini merupakan subjek perdebatan yang berkelanjutan dalam ilmu ekonomi.



**Gambar 2.3 Kurva Phillips**

Kurva berbentuk melengkung miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menunjukkan bahwa saat pengangguran rendah, inflasi cenderung tinggi. Sebaliknya, saat pengangguran tinggi, inflasi cenderung rendah. Terdapat hubungan negatif jangka pendek antara pengangguran dan inflasi. Ketika ekonomi tumbuh dan pengangguran turun, perusahaan menaikkan upah, biaya produksi naik, harga barang naik maka inflasi meningkat. Ketika pengangguran tinggi, tekanan upah dan harga melemah maka inflasi menurun.

### **c. Dampak Pengangguran**

Pengangguran tidak hanya berdampak langsung pada hilangnya pendapatan dan penurunan kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang luas. Secara pribadi, pengangguran dapat memicu stres finansial, depresi, dan penurunan tingkat kesejahteraan karena kehilangan mata pencaharian. Di tingkat makro, pengangguran menurunkan produktivitas nasional, mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor pajak, dan meningkatkan beban biaya sosial untuk kompensasi serta program kesejahteraan (Fahri, Jalil, & Kasnelly, 2019 dalam Sakti et al., 2021)

#### **1. Dampak terhadap Individu**

Dampak paling langsung dari pengangguran adalah kehilangan pekerjaan dan pendapatan, yang secara signifikan menurunkan standar kehidupan individu dan keluarga mereka. Penurunan pendapatan ini memaksa individu yang menganggur untuk mengurangi belanja konsumsi mereka, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran.

#### **2. Dampak terhadap Masyarakat dan Perekonomian**

Di tingkat makro, pengangguran mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, karena potensi kontribusi tenaga kerja tidak termanfaatkan. Hal ini berpotensi menyebabkan timbulnya kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya dalam masyarakat. Pengangguran juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dalam bentuk kompensasi bagi orang yang menganggur dan

program kesejahteraan, yang dapat membebani anggaran negara (Araei, 2024; ifrel, 2023).

### **2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Dibentuknya IPM adalah untuk mengalihkan fokus penilaian pembangunan dari sekadar pertumbuhan ekonomi semata ke arah yang lebih mendukung, yaitu menempatkan manusia dan kapabilitasnya sebagai kriteria utama. Pandangan tradisional tentang pembangunan seringkali terlalu terpaku pada metrik ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, IPM secara fundamental mengubah paradigma ini, mengakui bahwa kemajuan sejati harus berpusat pada manusia. Penekanan pada "manusia dan kapabilitasnya" menunjukkan bahwa pembangunan sesungguhnya adalah tentang memperluas pilihan dan meningkatkan kesejahteraan individu secara keseluruhan, bukan hanya akumulasi kekayaan. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sarana, bukan tujuan akhir, dari kemajuan manusia. (United Nations Development Programme, 2025)

Secara umum, IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Perubahan metodologi ini, dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik pada tahun 2010, merupakan penyempurnaan yang signifikan. Rata-rata aritmatik sebelumnya memungkinkan adanya "kompensasi," di mana skor yang sangat tinggi dalam satu dimensi (misalnya, pendapatan) dapat menutupi skor yang sangat rendah pada dimensi lain (misalnya, kesehatan atau pendidikan), sehingga tetap menghasilkan IPM

keseluruhan yang cukup baik. Namun, rata-rata geometrik memperkenalkan "penalti untuk ketidakseimbangan". Jika satu dimensi memiliki skor yang sangat rendah, hal itu akan secara tidak proporsional menarik turun rata-rata geometrik keseluruhan, bahkan jika dimensi lain memiliki skor tinggi. Pilihan desain ini secara implisit memperkuat filosofi pembangunan manusia yang seimbang, mendorong para pembuat kebijakan untuk mengatasi kekurangan di semua dimensi daripada hanya mengandalkan kekuatan di satu atau dua bidang. Ini menyiratkan penilaian yang lebih holistik dan kurang memaafkan terhadap kemajuan pembangunan suatu negara (Our World in Data, 2025).

#### **a. Dimensi Kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Kesehatan merupakan faktor vital yang secara langsung memengaruhi kualitas penduduk. Individu yang sehat cenderung memiliki energi dan kapasitas yang lebih besar untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat dan perekonomian. Selain itu, kesehatan juga memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan keterampilan dan produktivitas seseorang (Siddique, Siddique, & Ali, 2022). Keberhasilan dalam bidang pendidikan juga sangat bergantung pada kondisi kesehatan yang baik. Harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan, sementara kondisi kesehatan yang prima akan mengurangi tingkat depresiasi modal pendidikan. Menurut Bloom et al. (2001), kesehatan adalah sumber kesejahteraan manusia dan juga merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan.

## 1. Indikator Pengukuran Dimensi Kesehatan

Komponen kesehatan dalam IPM diukur secara eksklusif menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH). Indikator ini secara komprehensif mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia, tingkat akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai, serta kondisi lingkungan yang sehat dan aman di suatu wilayah.

## 2. Metodologi Perhitungan Indeks Kesehatan (Normalisasi dan Batasan Nilai)

Untuk mengintegrasikan angka harapan hidup ke dalam perhitungan IPM secara keseluruhan, nilai mentah indikator ini terlebih dahulu dinormalisasi ke dalam skala 0 hingga 1. Rumus normalisasi yang umum digunakan adalah:

$$Indeks\_AHH = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) menetapkan batasan nilai (goalposts) yang universal untuk angka harapan hidup saat lahir guna memastikan perbandingan yang adil antarnegara. AHH adalah Angka Harapan Hidup aktual di suatu wilayah (misalnya, provinsi atau kabupaten/kota) yang dihitung. Angka ini menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani oleh seseorang jika pola mortalitas saat ini tetap berlaku. AHH nilai minimum yang ditetapkan untuk Angka Harapan Hidup untuk perhitungan IPM, nilai minimum yang digunakan adalah 20 tahun. Angka 20 tahun ini dipilih sebagai batas bawah yang realistis, mengingat bahwa harapan hidup di bawah

angka ini sangat tidak umum di dunia modern. AHH nilai maksimum yang ditetapkan untuk Angka Harapan Hidup untuk perhitungan IPM, nilai maksimum yang digunakan adalah 85 tahun. Angka 85 tahun ini mencerminkan harapan hidup maksimal yang sangat tinggi dan masih jarang dicapai secara luas di sebagian besar populasi. Ini berfungsi sebagai target capaian yang ambisius (UNDP, 2023).

#### **b. Dimensi Pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pendidikan memegang peranan krusial sebagai kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui pendidikan, masyarakat diberdayakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup individu (manfaat intrinsik), tetapi juga secara signifikan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (manfaat instrumental).

Kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dalam indeks pendidikan, merupakan penentu utama tingkat produktivitas suatu bangsa. Pendidikan lebih dari sekadar perolehan pengetahuan; ia adalah kekuatan transformatif. Perbedaan antara "manfaat intrinsik" (peningkatan kapasitas, kebebasan) dan "manfaat instrumental" (pendapatan lebih tinggi) menyoroti dampak multifasetnya. Ini menyiratkan bahwa investasi dalam pendidikan menciptakan efek berantai: secara langsung meningkatkan kesejahteraan dan agensi individu, sekaligus secara tidak langsung mendorong produktivitas ekonomi, penyerapan teknologi, dan kemajuan sosial secara keseluruhan. Pendidikan berfungsi sebagai katalis, memungkinkan

kemajuan di berbagai dimensi pembangunan manusia, menjadikannya investasi jangka panjang yang sangat penting.

1. Indikator Pengukuran Dimensi Pendidikan: Rata-rata Lama Sekolah

Komponen pendidikan diukur menggunakan indikator utama yaitu rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*). RLS mencerminkan jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh oleh populasi, memberikan gambaran tentang akumulasi modal pendidikan historis.

2. Metodologi Perhitungan Indeks Pendidikan (Normalisasi, Batasan Nilai, dan Rata-rata Aritmatik)

Indeks pendidikan dihitung dengan menormalisasi RLS terpisah ke dalam skala 0 hingga 1. Rumus normalisasi yang sama dengan dimensi kesehatan digunakan:

$$Indeks\_RLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) menetapkan batasan nilai (goalposts) spesifik untuk indikator pendidikan. RLS Ini adalah rata-rata lama sekolah aktual di suatu wilayah (misalnya, provinsi atau kabupaten/kota) yang telah Anda hitung. RLS nilai minimum yang ditetapkan untuk rata-rata lama sekolah untuk perhitungan IPM, nilai minimum yang digunakan adalah 0 tahun. Ini merepresentasikan kondisi terendah, yaitu penduduk tidak pernah bersekolah. RLS nilai maksimum yang ditetapkan untuk rata-rata lama sekolah untuk perhitungan IPM, nilai maksimum yang digunakan

adalah 15 tahun. Angka ini mengacu pada asumsi pendidikan maksimal yang relevan dan realistis untuk sebagian besar populasi, setara dengan menamatkan pendidikan di jenjang Diploma III (D3) atau setara dengan SMA/ sederajat ditambah 3 tahun diploma (UNDP, 2023).

## **2.2 Regulasi Pemerintah**

### **2.2.1 Kemiskinan**

Pemerintah Indonesia secara konsisten menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang kompleks, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak tahun 1970-an, upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara berkelanjutan, namun tantangan seperti ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antarwilayah masih signifikan. Demikian pula, penanganan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) berfungsi sebagai payung hukum yang lebih luas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan diatur sebagai salah satu materi pokoknya, yang mencakup asas dan tujuan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, serta peran masyarakat. Fokus UU ini pada "Kesejahteraan Sosial" secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemerintah memandang kemiskinan sebagai bagian integral dari sistem kesejahteraan sosial yang lebih

besar, mengedepankan pendekatan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (diubah dengan Perpres Nomor 90 Tahun 2015, dan dicabut oleh Perpres 163 Tahun 2024) Perpres ini sebelumnya membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, diketuai oleh Wakil Presiden. Tugas TNP2K meliputi penyusunan kebijakan dan program, sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan. Perjalanan legislatif ini, mulai dari pembentukan, perubahan, pencabutan, hingga penggantian dengan bentuk kelembagaan baru, menandakan adanya proses reformasi tata kelola penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan dan adaptif.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. INPRES ini menetapkan target ambisius untuk mencapai 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Strategi utamanya mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pelaksanaan instruksi ini dikoordinasikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan berlaku hingga 31 Desember 2024.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Perda ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dalam akses keadilan. Perda ini mengatur ketentuan umum,

penyelenggaraan bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian, hak dan kewajiban, pendanaan, pelaporan, larangan, hingga ketentuan pidana. Peraturan ini mulai berlaku pada 4 April 2022.

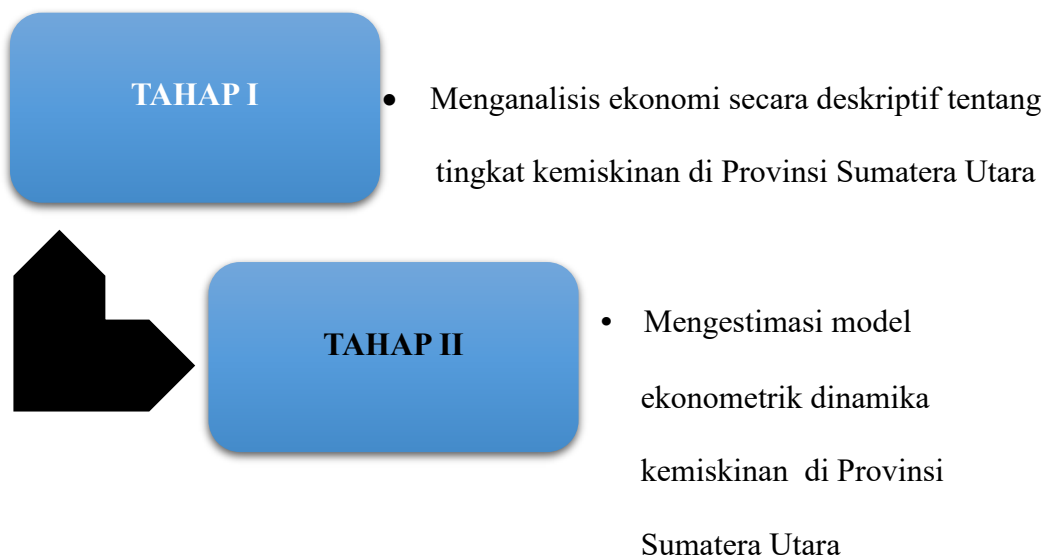
## 2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan (Fitri, Y., Rismawati Arum & Imron, 2023)	Regresi Linier Berganda (OLS)	<b>Dependen:</b> Tingkat Kemiskinan <b>Independen:</b> Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Tingkat Pengangguran	Secara simultan, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial, pengangguran tidak signifikan.
2	Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi (Ropikatul Hasanah et al., 2021)	Regresi Data Panel (Fixed Effects)	<b>Dependen:</b> Tingkat Kemiskinan <b>Independen:</b> Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita	Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan. Secara parsial, angka harapan hidup dan pengeluaran signifikan, rata-rata lama sekolah tidak signifikan.
3	Pengaruh PDRB, Angka Harapan Hidup, dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (2013–2021) (Arfa Valiant Kevin et al., 2020)	Regresi Data Panel (Stata)	<b>Dependen:</b> Kemiskinan <b>Independen:</b> PDRB, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah	Angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
4	Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Pengeluaran Perkapita, dan Tingkat	Regresi Data Panel (Stata 14)	<b>Dependen:</b> Indeks Kedalaman Kemiskinan <b>Independen:</b>	Secara simultan signifikan. Parsial: Rata-rata lama sekolah (-) dan pengangguran (+)

	Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Jawa Timur (Yoan Faralin Nugroho et al., 2022)		Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Pengeluaran Perkapita, Pengangguran	signifikan; angka harapan hidup dan pengeluaran tidak signifikan.
5	Pengaruh Rata Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup serta PDRB Per Kapita terhadap Kemiskinan melalui Analisis Jalur Pengangguran di DIY (Ahmad Bayu Bagas Samudra & Mohammad Wahed, 2019)	Analisis Jalur (Path Analysis), Uji Sobel	<b>Dependen:</b> Kemiskinan <b>Independen:</b> Rata-rata Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup, PDRB Per Kapita <b>Intervening:</b> Pengangguran Terbuka	Pengangguran menjadi mediator signifikan. Harapan hidup secara tidak langsung meningkatkan kemiskinan melalui peningkatan pengangguran.

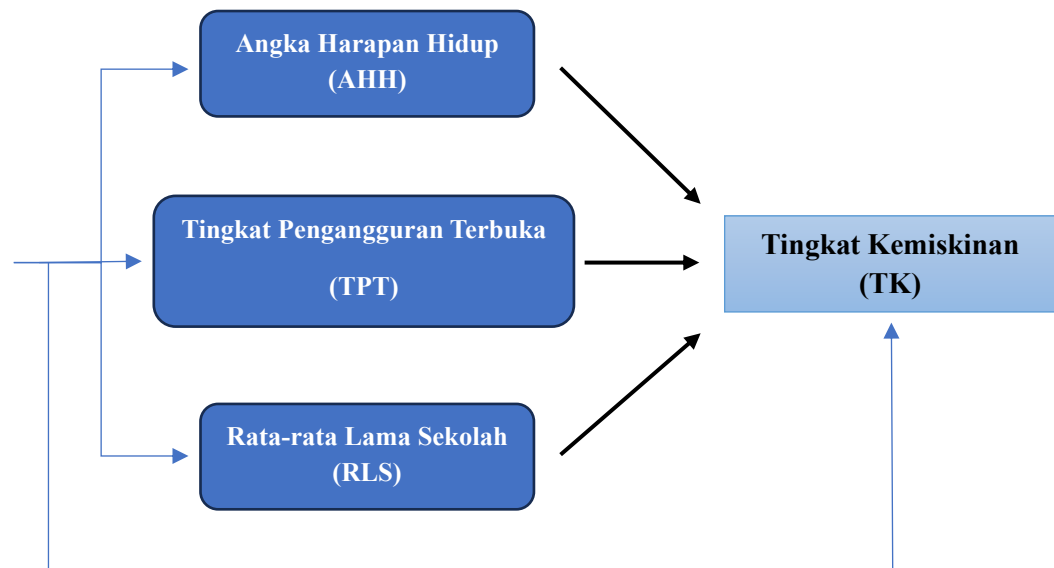
## 2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2.4 Bagan Konseptual Model

## 2.5 Model Kerangka Analisis Yang Mempengaruhi Tingkat

### Kemiskinan



**Gambar 2.5 Kerangka Konseptual Model**

Dalam model diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan variabel bebas yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (TK) yang merupakan variabel terikat.

## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian-penelitian terdahulu maka adapun hipotesis yang diajukan adalah adanya pengaruh signifikan antara tingkat pengangguran terbuka, angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditetapkan guna menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan metode yang menggunakan data berupa angka atau bilangan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau keadaan secara objektif, tanpa melakukan pengujian hipotesis yang mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui pihak ketiga atau sumber lain yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Adapun jenis data yang digunakan adalah data time series, yaitu data yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu pada variabel tertentu.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dapat dihubungkan sehingga penelitian ini dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Tingkat Kemiskinan (K).

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Model Ekometrika**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Kategori</b>	<b>Sumber Data</b>
Tingkat Kemiskinan (TK)	Indikator ini merupakan persentase penduduk yang pengeluarannya per kapitanya berada di bawah Garis Kemiskinan (satuan persen)	Variabel Terikat	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Indikator ini merupakan persentase angkatan kerja yang sedang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. (satuan persen)	Variabel Bebas	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
AHH (Angka Harapan Hidup)	Indikator demografi yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang sejak ia dilahirkan, dengan asumsi pola angka kematian berdasarkan kelompok umur pada periode waktu tertentu (tahun perhitungan AHH) tidak mengalami perubahan di masa depan. (tahun)	Variabel Bebas	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk pada kelompok usia tertentu (biasanya 15 tahun ke atas). Indikator ini mencerminkan tingkat capaian pendidikan penduduk di suatu wilayah atau negara. (tahun)	Variabel Bebas	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), data Angka Harapan Hidup (AHH), data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Tingkat Kemiskinan (TK) yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

b. waktu penelitian

Waktu penelitian direncanakan selama 3 bulan yaitu April 2025 sampai Juni 2025.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber yaitu data sekunder, yaitu merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Berdasarkan bentuk adalah data kuantitatif, Sedangkan berdasarkan waktu adalah data time series (kurun waktu) yang dimulai dari tahun 2015 – 2024.

b. Sumber Data

Sumber Data Data yang digunakan dan teknik pengumpulannya dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan baik melalui website resmi maupun pengambilan langsung ke Pojok Statistik Universitas Muhammadiyah Sumatera. Serta penelitian kepustakaan (library research) yang juga dilakukan melalui Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , baik dengan secara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji literatur-literatur yang tersedia seperti buku, jurnal, majalah, dan artikel.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data sekunder melalui penelusuran dan pengambilan data dari berbagai dokumen yang relevan. Sumber data diperoleh melalui website-website resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya, yang menyediakan data yang valid.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Menganalisis ekonomi secara deskriptif tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara**

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, maupun nerasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Analisis Ekonomi Deskriptif Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Namun, untuk memperoleh hasil analisis yang lebih mendalam dan memastikan validitas model kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan langkah lanjutan berupa pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik dalam regresi linear. Uji asumsi klasik menjadi penting untuk memastikan bahwa model yang dibangun memenuhi syarat-syarat statistik seperti normalitas, homoskedastisitas, tidak adanya autokorelasi, dan tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian, hasil estimasi yang diperoleh dari model tersebut dapat

dipercaya dan dijadikan dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan maupun rekomendasi kebijakan.

### **a. Uji Asumsi Klasik**

Penggunaan OLS mensyaratkan pemenuhan beberapa asumsi (disebut asumsi klasik: Gauss-Markov). Jika asumsi ini dipenuhi, maka parameter yang diperoleh dengan OLS adalah bersifat Best Linier Unbiased Estimator (BLUE). Dalam praktiknya, sangat mungkin sekali satu atau lebih asumsi tersebut tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian estimator OLS tidak lagi BLUE. Pada kasus yang ekstrem, estimator dan/atau pengujian hipotesis bahkan tidak dapat dilakukan. Dalam bagian ini akan dibahas suatu pelanggaran asumsi klasik yang sering terjadi yakni autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinearitas (Ariefianto, 2012).

#### **1. Autokorelasi**

Autokorelasi adalah fenomena model (Vogelvang, 2005). Ia timbul dari spesifikasi yang tidak tepat terhadap hubungan antara variabel endogeonus dengan variabel penjelas. Akibat kurang memadainya spesifikasi maka dampak faktor yang tidak masuk ke dalam model akan terlihat pada pola residual. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson atau Durbin Watson Test. Dimana apabila  $d_i$  dan  $d_u$  adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada  $2 < DW < 4$  - maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi atau no-autocrorelation (Ariefianto, 2012).

## 2. Heterokedastisitas

Asumsi penting (asumsi Gauss Markov) dalam penggunaan OLS adalah varians residual yang konstan. Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual disebut homokedastis, jika tidak, disebut heterokedastis (Ariefianto, 2012).

Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan uji white. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai  $R^2$  digunakan untuk menghitung  $X^2$  dimana  $X^2 = n \cdot R^2$  yang didapat (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai *Probability Observation R-Square* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heterokedastisitas dalam model ditolak. Maka hipotesis alternatif adanya heterokedastisitas dalam model ditolak.

## 3. Multikolinearitas

Gujarati (2003) menyatakan bahwa multikolinearitas adalah fenomena sampling. Ia terjadi pada sampel dan bukan pada populasi. Hal ini tentu saja jika kita telah menspesifikasikan variabel yang masuk ke dalam model dengan benar (misalnya tidak ada variabel yang merupakan multiplikasi dari variabel lainnya). Dengan kata lain, jika dimungkinkan untuk bekerja pada populasi maka multikolinearitas tidak akan pernah menjadi suatu masalah (Ariefianto, 2012).

4. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *auxilliary regression* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika regresi persamaan utama lebih dari regresi *auxilliary* maka di dalam model tidak terjadi multikolinearitas. Model *auxilliary regression* adalah:

$$F_t = \frac{R^2 \cdot X_1, X_2, X_3, \dots, X_k / (k-2)}{1 - R^2 \cdot X_1, X_2, X_3, \dots, X_k / (N-K+1)} \dots \dots \dots (3-5)$$

### 3.6.2 Mengestimasi Model Tingkat kemiskinan di provinsi sumatera utara

#### a. Metode Estimasi

Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Model Regresi Linier Berganda. Dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Menurut Teorema Gauss-Markov, setiap pemerkira/estimator OLS harus memenuhi kriteria BLUE (Best, Linier, Unbiased, Estimator). (Setyo Tri wahyudi, S.E.,M.Ec, 2020)

Dalam model regresi linear berganda yang di estimasi adalah konstanta masing-masing  $\alpha_{1,2}$  dan koefisien dari parameter yg di peroleh, dalam asumsi utama yang mendasari metode regresi dengan menggunakan teknik OLS adalah sebagai berikut (Daulay et al., 2024) :

- a) Metode regresi linier, artinya: linear dalam parameter.
- b) X diasumsikan nonstokastik, artinya: nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang.
- c) Nilai rata-rata kesalahan adalah nol, atau
- d) Homoskedestisitas, artinya varians kesalahan sama untuk setiap periode (homo = sama; skedastisitas = sebaran). Dinyatakan dalam bentuk matematis:
 
$$\text{var}(u_i | X_i) = \sigma^2.$$
- e) Tidak ada aotokorelasi antarkesalahan (antara dan  $u_i$  dan  $u_j$  tidak ada korelasinya). Dinyatakan dalam bahasa matematis: covarians  $(u_i, u_j) = 0$ .
- f) Antara u dan X saling bebas, sehingga  $\text{cov}(u_i, X_i) = 0$ .
- g) Tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel bebas.
- h) Jumlah observasi, n, harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi (jumlah variabel bebas).
- i) Adanya variabilitas dalam nilai X, artinya nilai X harus berbeda (tidak boleh sama semua).
- j) Model regresi telah dispesifikasikan secara benar. Dengan kata lain tidak ada bias (kesalahan) spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empiris.

Kemudian model kedua dapat dianalisis dengan menggunakan teknik 2SLS (Two Stage Least Square Methode) dalam bentuk regresi berganda. Asumsi utama yang mendasari model regresi dengan menggunakan teknik 2SLS adalah sebagai berikut (Ariefianto, 2012):

1. Nilai rata-rata : disturbance term = 0

2. Tidak terdapat korelasi serial (serial auto correlation) diantara disturbance term COV .
3. Sifat momocidentecity dari disturbance term  $\text{var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$
4. Covariance antara  $\varepsilon_t$  dari setiap variabel bebas (x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.
6. Tidak terdapat collinerity antara variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.

#### **b. Model Estimasi**

Penelitian ini akan mengestimasi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara menggunakan data time series dari tahun 2015-2024. model Ekonometrika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TK_t = \alpha_0 + \alpha_1 TPT_t + \alpha_2 AHH_t + \alpha_3 RLS_t + \varepsilon_t$$

Dimana :

$TK_t$	= Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara (persen)
$TP_t$	= Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Utara (persen)
$AHH_t$	= Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara (tahun)
$RLS_t$	= Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara (tahun)
t	= Periode Waktu 2015 - 2024
$\alpha_0$	= Konstanta (intercept)
$\alpha_{1,2,3}$	= Koefisien Variabel Bebas
$\varepsilon_t$	= Error Term

Pada model estimasi ini, tingkat kemiskinan (TK) ditempatkan sebagai variabel terikat atau variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya dalam model. Sementara itu, terdapat tiga variabel bebas

atau variabel independen yang diasumsikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015–2024.

Yang pertama adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang secara logika dan teori ekonomi berkaitan langsung dengan kemiskinan. Semakin tinggi pengangguran, maka peluang masyarakat untuk memperoleh penghasilan layak menurun, sehingga risiko jatuh ke dalam kemiskinan semakin besar. Oleh karena itu, variabel ini diperkirakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kemudian, ada angka harapan hidup (AHH), yang mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup penduduk. Jika harapan hidup meningkat, artinya masyarakat cenderung hidup lebih sehat dan produktif, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Maka dari itu, variabel ini diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Yang ketiga adalah rata-rata lama sekolah (RLS), yang merupakan indikator tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan, karena dengan pendidikan yang lebih tinggi, peluang kerja dan penghasilan juga meningkat. Maka, semakin tinggi rata-rata lama sekolah, seharusnya tingkat kemiskinan akan menurun. Oleh karena itu, variabel ini juga diharapkan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dengan kata lain, model ini ingin melihat seberapa besar kemiskinan dipengaruhi oleh kondisi tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan. Ketiganya merupakan pilar utama pembangunan manusia, dan dari sisi teoritis maupun empiris, sering menjadi penentu utama dalam studi-studi terkait kemiskinan.

### c. Pengujian hipotesis

#### 1. Uji Parsial (Uji t)

Uji korelasi parsial dilakukan dengan menggunakan uji t, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (P dan IPM) secara parsial terhadap variabel terikat Kemiskinan (K). Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### 1) Perumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$  hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai 2023)

$H_a : \beta_1 \neq 0$  (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai 2023)

##### 2) Uji Statistik Uji statistik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t_h = \frac{\beta_i}{se\beta_i}$$

Dimana:

$\beta_i$  = koefisien regresi

se = standart eror

i = 1,2,3

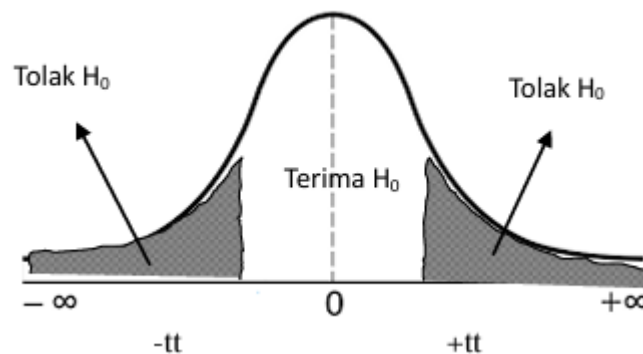
Dibandingkan dengan  $t_{tabel} = \pm t (\alpha/2, n - 1)$  dengan derajat korelasi

X = 5%

## 3) Kriteria Uji:

Terima  $H_0$  jika  $-t_{table} < t_{hitung} < +t_{table}$ , hal lain tolak  $H_0$  atau dalam distribusi

Kurva normal t



Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai  $\text{sig} < \alpha = 5\%$

4) Kesimpulan Jika sesuai dengan kriteria uji, maka terima  $H_0$  atau tolak  $H_0$ .**2. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui pada model apakah variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan signifikan terhadap Kemiskinan (K) di Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

- 1) Hipotesa  $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$  (Tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan (TK) di Provinsi Sumatera Utara.  
  
 $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$  (ada hubungan yang signifikan secara serentak antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Sumatera Utara.).

2) Uji statistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Dimana :

k = jumlah parameter yang diestimasi

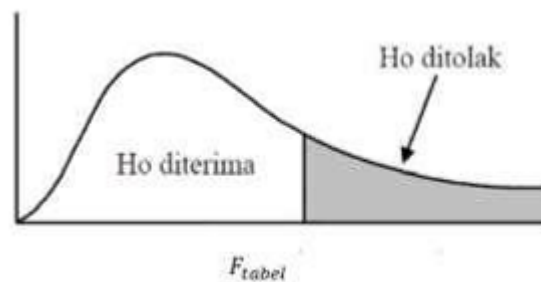
n = jumlah sampel

dibandingkan dengan F table = ( $\alpha$ , n-k-1).

3) Kriteria Uji

Terima  $H_0$  jika F-hitung < F- tabel, hal lain tolak  $H_0$  atau dalam distribusi,

Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut:



Atau dalam olahan software eviews dikatakan signifikan jika nilai sig  $\leq 5\%$ .

4) Kesimpulan

- a. Jika p-value  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- b. Jika p-value  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### 3.7 Tahapan Analisis

#### 1. Penaksiran

a. Korelasi (R)

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan derajat keeratan antara variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup

(AHH), Rata-rata lama Sekolah (RLS), dan Tingkat Kemiskinan (TK). Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana mulai -1 sampai +1. Nilai r-1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, nilai r yang -0 mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan – (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jika bernilai + (positif) maka variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. (Setyo Tri wahyudi, S.E.,M.Ec, 2020)

b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2 \times 100\%$ ) adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi ( $D$ ) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model.

$$Adjusted R^2 = 1 + R^2 - \left( \frac{-1}{n-k} \right) \dots\dots\dots$$

Dimana:

$R^2$  = Koefisien korelasi

n = Jumlah Sampel

k = Jumlah variabel independen

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara**

##### **4.1.1 Kondisi Geografi**

Provinsi Sumatera Utara, yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera, Indonesia, merupakan salah satu provinsi dengan kondisi geografis yang sangat beragam dan strategis. Provinsi Sumatera Utara secara astronomis terletak di antara 1° hingga 4° Lintang Utara dan 98° hingga 100° Bujur Timur. Letak ini menempatkannya di sekitar garis khatulistiwa, menjadikannya beriklim tropis. Posisi geografisnya sangat strategis karena berada pada jalur perdagangan dan pelayaran internasional Selat Malaka. Kedekatannya dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memperkuat perannya sebagai simpul ekonomi regional yang penting, memfasilitasi arus barang dan jasa serta interaksi budaya. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencakup daratan dan lautan. Luas daratannya mencapai sekitar 72.981,23 km<sup>2</sup>, meskipun beberapa sumber menyebutkan 71.680,68 km<sup>2</sup> atau 72.460,74 km<sup>2</sup>. Luas ini merepresentasikan sekitar 3,72% dari total luas Republik Indonesia. Selain daratan, Sumatera Utara juga memiliki luas lautan yang signifikan, yaitu sekitar 109.433,02 km<sup>2</sup>, menunjukkan bahwa wilayah perairannya lebih luas dibandingkan daratannya.

Provinsi Sumatera Utara memiliki batas-batas administratif yang jelas dengan provinsi dan perairan di sekitarnya :

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Provinsi Aceh.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Selat Malaka.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Samudera Hindia.

**Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatera Utara**



Sumber: [petatematikindo.wordpress](http://petatematikindo.wordpress.com)

#### 4.1.2 Kondisi Topografi

Secara topografi, Provinsi Sumatera Utara menampilkan bentang alam yang sangat bervariasi, membentang dari dataran rendah pesisir yang relatif datar di bagian timur, wilayah bergelombang hingga berbukit di bagian tengah yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan, hingga dataran bergelombang di bagian barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Ketinggian lahan di provinsi ini juga sangat beragam, mulai dari 0 hingga 2.200 meter di atas permukaan laut (dpl). Kemiringan tanah juga sangat beragam: 0-12% seluas 47.810 km<sup>2</sup>, 12-40% seluas 6.305 km<sup>2</sup>, dan di atas 40% seluas 17.719 km<sup>2</sup>.

Pegunungan Bukit Barisan membujur di tengah-tengah provinsi dari utara ke selatan, membentuk Dataran Tinggi Batak yang luasnya sekitar dua pertiga dari provinsi. Dataran tinggi ini dihiasi oleh kerucut gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Beberapa puncak vulkanik yang menonjol meliputi:

- Gunung Sinabung: Terletak di Kabupaten Karo, merupakan gunung berapi paling aktif di wilayah ini dengan ketinggian sekitar 2.451 meter (8.041 kaki) atau 2.460 meter (8.070 kaki).
- Gunung Sibayak: Juga terletak di Dataran Tinggi Karo, memiliki ketinggian 2.094 meter (6.870 kaki) atau 2.181 meter (7.156 kaki).
- Gunung Sorikmarapi: Dengan ketinggian 2.145 meter (7.037 kaki).

Keberadaan gunung berapi ini tidak hanya membentuk bentang alam yang dramatis tetapi juga berkontribusi pada kesuburan tanah di sekitarnya, meskipun juga membawa risiko bencana.

Danau Toba, yang terletak di tengah Dataran Tinggi Batak pada ketinggian 910 meter (2.985 kaki) di atas permukaan laut, adalah salah satu bentang alam paling ikonik di Sumatera Utara dan dunia. Danau ini merupakan sisa dari letusan supervulkanik purba yang masif, diperkirakan terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia, membentang sekitar 100 kilometer (62 mil) panjangnya dan 30 kilometer (19 mil) lebarnya, dengan kedalaman maksimum 505 meter (1.657 kaki). Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau vulkanik sepanjang 44 km (27 mil) dan lebar 19 km (12 mil), yang terhubung dengan pantai barat danau oleh sebuah tanah genting buatan manusia. Pulau Samosir adalah tujuan wisata populer, kaya akan sejarah Batak dan pemandangan alam yang eksotis. Danau Toba sendiri telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada Juli 2020, mengakui nilai geologis dan budayanya yang luar biasa.

#### **4.1.3 Kondisi Iklim**

Iklim di Provinsi Sumatera Utara secara umum termasuk dalam kategori iklim tropis. Iklim ini sangat dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Klasifikasi iklim Köppen untuk wilayah seperti Saribudolok menunjukkan iklim hutan hujan tropis (Af), yang berarti daerah tersebut mengalami suhu tinggi dan curah hujan melimpah sepanjang tahun. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang hangat dan lembab secara konsisten di sebagian besar wilayah provinsi.

## **4.2 Perkembangan Dinamika Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara**

Sumatera Utara sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam potensi sumber daya alam serta manusia, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Namun demikian, pencapaian kesejahteraan yang merata masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah dinamika tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dan fluktuatif dari tahun ke tahun.

Dalam rentang waktu satu dekade terakhir, yaitu antara tahun 2015 hingga 2024, angka kemiskinan di Sumatera Utara mengalami perubahan yang dinamis. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tren umum menunjukkan adanya kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin, meskipun penurunan ini tidak berlangsung secara konsisten setiap tahun. Sebagai contoh, pada tahun-tahun awal dalam periode tersebut, upaya pengurangan kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. Namun, tantangan global seperti pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan lonjakan angka kemiskinan yang cukup signifikan, akibat kontraksi ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta terbatasnya mobilitas dan aktivitas usaha masyarakat. Setelah pandemi mereda, angka kemiskinan kembali menunjukkan penurunan, meskipun belum sepenuhnya pulih ke tingkat sebelum pandemi.

Dinamika ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional yang saling berinteraksi. Terdapat beberapa variabel sosial-ekonomi yang memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, antara lain yaitu:

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka yang merupakan indikator krusial yang menggambarkan ketimpangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu wilayah, semakin besar pula risiko meningkatnya jumlah penduduk miskin, karena masyarakat tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai. Pengangguran yang tinggi juga dapat menjadi cerminan dari tidak optimalnya sistem pendidikan, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya peluang usaha, terutama di daerah pedesaan dan kawasan tertinggal.
2. Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) yang menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat dan efektivitas pelayanan kesehatan dasar. Masyarakat dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap gizi, sanitasi, air bersih, dan layanan kesehatan. Hal ini memungkinkan mereka untuk hidup lebih produktif dan mengurangi beban ekonomi akibat penyakit. Sebaliknya, angka harapan hidup yang rendah menunjukkan tingginya kerentanan sosial, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kemiskinan.
3. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang mengindikasikan sejauh mana penduduk dapat mengakses pendidikan formal. Pendidikan memainkan peranan vital dalam pembangunan manusia karena berkorelasi langsung dengan peluang kerja dan tingkat pendapatan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan tinggi, serta lebih

resisten terhadap risiko kemiskinan. Rata-rata lama sekolah yang rendah, yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Sumatera Utara, menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan sebagai salah satu strategi jangka panjang dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

### 1. Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia dengan populasi lebih dari 14 juta jiwa (berdasarkan data BPS), menyimpan potret yang kompleks mengenai distribusi kesejahteraan penduduknya. Meskipun secara makro Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, namun persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya tuntas.

**Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin Total  
Provinsi Sumatera Utara (2015-2024)**

Tahun	September (%)
2015	10,79
2016	10,27
2017	9,28
2018	8,94
2019	8,63
2020	9,14
2021	8,49
2022	8,33
2023	8,15
2024	7,19

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan data yang tercatat pada bulan September selama kurun waktu 2015 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat tren penurunan angka

kemiskinan di Sumatera Utara. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,79%. Angka ini kemudian mengalami fluktuasi namun secara umum menurun hingga mencapai 7,19% pada tahun 2024. Penurunan tersebut tentu memberikan indikasi adanya perbaikan dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Namun, penurunan angka kemiskinan ini tidak bisa dimaknai secara sederhana tanpa mempertimbangkan dimensi lain yang mendasarinya.

## 2. Pengangguran Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara, pengangguran bukan hanya menyangkut ketiadaan pekerjaan, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia, serta dinamika struktur ekonomi lokal dan nasional. Tingginya tingkat pengangguran berpotensi memunculkan berbagai dampak negatif seperti peningkatan kemiskinan, penurunan produktivitas, meningkatnya beban sosial pemerintah, hingga kerentanan sosial yang lebih luas.

**Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Provinsi Sumatera Utara (2015-2024)**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)
2015	6,71%
2016	5,84%
2017	5,60%
2018	5,56%
2019	5,41%
2020	6,91%
2021	6,33%
2022	6,16%
2023	5,89%
2024	5,60%

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan data yang tercatat dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 hingga 2024, dapat terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara mengalami fluktuasi yang mencerminkan naik-turunnya daya serap pasar kerja terhadap angkatan kerja. Pada tahun 2015, TPT tercatat sebesar 6,71%, dan menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya: 5,84% pada 2016, 5,60% pada 2017, dan 5,56% pada 2018. Penurunan ini menunjukkan bahwa dalam periode tersebut, pertumbuhan ekonomi dan kegiatan usaha cenderung meningkat sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas.

Tahun 2019 mencatat TPT terendah dalam dekade tersebut, yakni sebesar 5,41%. Angka ini menjadi indikator positif dari kinerja perekonomian Sumatera Utara menjelang akhir dekade 2010-an. Namun, kondisi ini berubah drastis pada tahun berikutnya akibat pandemi COVID-19. Sumatera Utara mengalami tekanan ekonomi yang hebat, terutama dari sisi ketenagakerjaan. Pada tahun 2020, TPT melonjak tajam menjadi 6,91%. Pasca-pandemi, proses pemulihan ketenagakerjaan mulai menunjukkan kemajuan meskipun tidak berlangsung secara cepat. Pada tahun 2021, TPT menurun menjadi 6,33%, kemudian ke 6,16% pada 2022. Meskipun belum kembali ke tingkat sebelum pandemi, penurunan ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara mulai kembali membangun kapasitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2023, TPT kembali turun ke angka 5,89%, dan akhirnya tercatat sebesar 5,60% pada tahun 2024 angka yang sama dengan tahun 2017.

### 3. Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Sumatera Utara

Secara umum, AHH menunjukkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan tetap seperti saat ini sepanjang hidupnya. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, gizi, serta tingkat kesejahteraan secara umum.

**Tabel 4.3 Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
2015	68,29
2016	68,33
2017	68,37
2018	68,61
2019	68,95
2020	73
2021	73,1
2022	73,39
2023	73,67
2024	68,36

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan data AHH dari tahun 2015 hingga 2024, terlihat adanya dua fase yang mencolok. Pada periode 2015 hingga 2019, AHH di Sumatera Utara mengalami peningkatan bertahap. Dimulai dari angka 68,29 tahun pada 2015, angka ini naik secara konsisten, hingga mencapai 68,95 pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut, Provinsi Sumatera Utara berhasil menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup. Faktor-faktor seperti penurunan angka kematian bayi, peningkatan cakupan imunisasi, akses layanan kesehatan yang lebih luas, serta peningkatan kesadaran hidup sehat di kalangan masyarakat turut berkontribusi terhadap kenaikan AHH. Memasuki tahun 2020, terjadi lonjakan signifikan dalam angka AHH menjadi

73,00 tahun. Kenaikan ini kemudian berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya: 73,10 (2021), 73,39 (2022), dan mencapai 73,67 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, AHH mendadak turun drastis ke angka 68,36 tahun.

#### 4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sumatera Utara

Salah satu indikator penting yang sering digunakan untuk menilai kualitas pendidikan suatu wilayah adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yaitu rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan sejauh mana masyarakat suatu wilayah memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan secara formal, serta sejauh mana sistem pendidikan mampu menjangkau dan mempertahankan peserta didik dalam sistem tersebut.

**Tabel 4.4 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
2015	9,10
2016	9,22
2017	9,34
2018	9,51
2019	9,56
2020	9,71
2021	9,88
2022	10,02
2023	10,04
2024	10,09

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dalam RLS selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2015, angka RLS tercatat sebesar 9,10 tahun, kemudian meningkat secara perlahan namun stabil menjadi 9,22 tahun pada 2016, 9,34 tahun pada 2017, dan 9,51 tahun pada 2018. Pada

tahun 2019, angka ini naik menjadi 9,56 tahun dan terus berlanjut ke 9,71 tahun di tahun 2020. Meskipun peningkatannya tidak drastis dari tahun ke tahun, kestabilan tren ini mencerminkan adanya kesinambungan dalam peningkatan akses pendidikan, baik dari sisi partisipasi maupun keberlangsungan sekolah di semua jenjang.

Kondisi pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada awal 2020 tidak serta-merta menghentikan kemajuan pendidikan di Sumatera Utara dalam konteks RLS. Hal ini dapat dilihat dari tren RLS yang justru terus meningkat selama masa pandemi: 9,88 tahun pada 2021, lalu menembus angka 10 tahun pada 2022, 10,04 tahun pada 2023, dan mencapai 10,09 tahun pada 2024. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat gangguan dalam sistem pembelajaran akibat pembatasan sosial dan peralihan ke metode daring, masyarakat tetap memiliki komitmen yang tinggi terhadap pendidikan, didukung oleh kebijakan pemerintah dan adaptasi teknologi dalam dunia pendidikan.

### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

Dalam analisis regresi, uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang kita gunakan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Memenuhi asumsi-asumsi ini penting agar hasil estimasi regresi (seperti koefisien dan nilai p) valid, efisien, dan tidak bias. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, interpretasi hasil regresi bisa menjadi keliru dan kesimpulan yang ditarik bisa jadi tidak akurat. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa estimasi regresi yang

dihasilkan tidak bias, konsisten, dan memiliki ketepatan dalam penaksiran."  
(Ghozali, 2018)

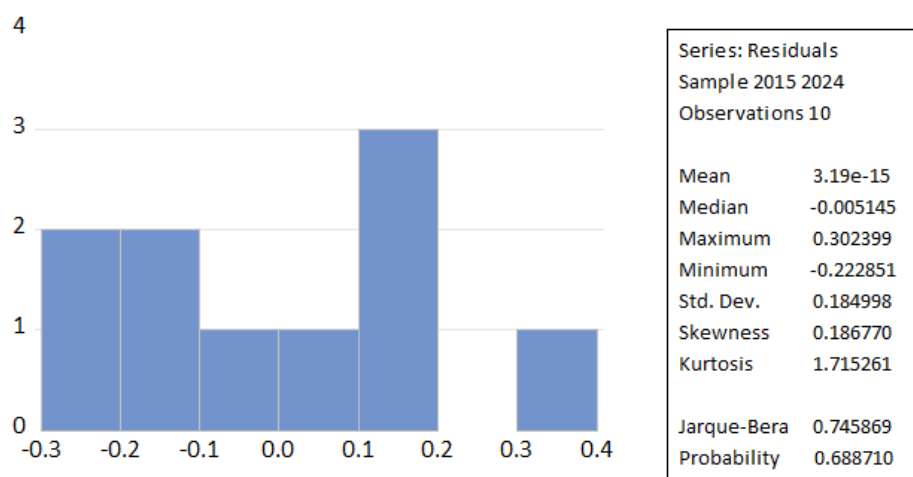
### 1. Uji Normalitas

Menurut kriteria pengambilan keputusan maka:

Jika nilai sig > 0,05, maka data berdistribusi normal

Jika nilai sig < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal

**Gambar 4.2 Hasil Olah Uji Normalitas**



Sumber : *Eviews 12* diolah

Hasil uji normalitas pada data diatas menunjukkan bahwa nilai probability nya adalah sebesar  $0,688710 > 0,05$  atau sebanyak  $68,87\% > 5\%$ , maka data diatas berdistribusi normal atau diterima. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai normalitas terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun sudah memenuhi salah satu syarat penting dari regresi linear klasik, sehingga estimasi parameter dapat dikatakan valid dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibentuk terjadi korelasi antara variabel dalam model tersebut. Jika terjadi multikolinearitas maka variabel-variabel tidak ortogonal atau variabel saling berkorelasi, artinya antar variabel independen saling berhubungan, atau nilai korelasi antara sesama variabel independent sama dengan nol. Salah satu cara untuk melihat adanya tidak multikolinearitas pada suatu model regresi ialah dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Menurut kriteria pengambilan keputusan maka, jika nilai  $VIF < 10$ , maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (aman), jika nilai  $VIF > 10$ , maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors  
Date: 06/13/25 Time: 15:06  
Sample: 2015 2024  
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.417715	1055.336	NA
TPT	0.042482	299.9649	1.957990
AHH	0.003188	3082.060	3.478354
RLS	0.120626	2189.464	2.702676

Sumber : *Eviews 12* diolah

Hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa nilai VIF (Variance Inflation Factor) variabel TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah sebesar  $1.957990 < 10$ , nilai AHH (Angka Harapan Hidup) adalah sebesar  $3.478354 < 10$ , dan nilai RLS (Rata-rata Lama Sekolah) adalah sebesar  $2.702676 < 10$ .

Berdasarkan hasil uji VIF yang ditunjukkan oleh nilai Centered VIF, seluruh variabel independen dalam model memiliki nilai VIF  $< 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini. Hubungan antar variabel independen tidak saling mempengaruhi secara berlebihan, sehingga estimasi parameter tetap reliable dan valid secara statistik.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas berarti variasi residual tidak sama untuk semua variabel keputusan terjadi atau tidaknya heterokedastisitas pada model regresi linier ialah dengan melihat nilai pada *Test White*. Menurut kriteria pengambilan keputusan maka, jika nilai  $\text{sig} > 0,05$  maka tidak terjadi heterokedastisitas, jika nilai  $\text{sig} < 0,05$ , maka terjadi heterokedastisitas. Dari hasil olahan data, maka diperoleh hasil pada tabel berikut ini :

**Gambar 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	0.904123	Prob. F(3,6)	0.4924	
Obs*R-squared	3.113240	Prob. Chi-Square(3)	0.3745	
Scaled explained SS	0.400820	Prob. Chi-Square(3)	0.9401	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 06/13/25 Time: 15:10				
Sample: 2015 2024				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.141235	0.143760	0.982436	0.3638
TPT^2	-0.001496	0.002031	-0.736591	0.4892
AHH^2	5.59E-05	4.82E-05	1.160361	0.2900
RLS^2	-0.003582	0.002202	-1.626330	0.1550
R-squared	0.311324	Mean dependent var	0.030802	
Adjusted R-squared	-0.033014	S.D. dependent var	0.027459	
S.E. of regression	0.027909	Akaike info criterion	-4.030576	
Sum squared resid	0.004673	Schwarz criterion	-3.909542	
Log likelihood	24.15288	Hannan-Quinn criter.	-4.163350	
F-statistic	0.904123	Durbin-Watson stat	2.534247	
Prob(F-statistic)	0.492378			

Sumber : *Eviews 12* diolah

Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.4924, probabilitas Obs\*R-squared sebesar 0.3745, dan probabilitas Scaled Explained SS sebesar 0.9401. Ketiga nilai probabilitas tersebut seluruhnya jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Uji White, model regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari semua nilai probabilitas uji yang lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi klasik mengenai homoskedastisitas terpenuhi. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena menghasilkan estimasi yang efisien dan valid secara statistik.

#### **4. Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi, dan jika nilai sig  $\leq$  0,05, maka terjadi autokorelasi.

### Gambar 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.109065	Prob. F(2,4)	0.8992
Obs*R-squared	0.517126	Prob. Chi-Square(2)	0.7722

Test Equation:  
Dependent Variable: RESID  
Method: Least Squares  
Date: 06/13/25 Time: 15:16  
Sample: 2015 2024  
Included observations: 10  
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.088135	3.449068	-0.025553	0.9808
TPT	0.035133	0.257834	0.136261	0.8982
AHH	-0.005639	0.084103	-0.067052	0.9498
RLS	0.028280	0.438987	0.064420	0.9517
RESID(-1)	0.228334	0.546307	0.417959	0.6974
RESID(-2)	-0.125824	0.689584	-0.182464	0.8641

R-squared	0.051713	Mean dependent var	3.19E-15
Adjusted R-squared	-1.133647	S.D. dependent var	0.184998
S.E. of regression	0.270227	Akaike info criterion	0.504599
Sum squared resid	0.292090	Schwarz criterion	0.686150
Log likelihood	3.477006	Hannan-Quinn criter.	0.305438
F-statistic	0.043626	Durbin-Watson stat	2.089376
Prob(F-statistic)	0.997950		

Sumber : *Eviews 12* diolah

Berdasarkan hasil Uji Breusch-Godfrey, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi, baik pada lag ke-1 maupun ke-2. Hal ini diperkuat oleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,8992 dan Chi-Square sebesar 0,7722, yang keduanya berada jauh di atas tingkat signifikansi 5%. Nilai Durbin-Watson (DW) dalam hasil regresi utama juga mendekati angka ideal 2, yaitu 2.089376, yang semakin memperkuat bukti bahwa tidak terjadi autokorelasi di dalam model ini.

Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi klasik mengenai tidak adanya autokorelasi, sehingga residual dari model dianggap bersifat acak (random) dan tidak tergantung pada waktu, yang artinya hasil regresi layak dianalisis lebih lanjut tanpa perlu perbaikan struktur korelasi antar waktu.

## 4.4 Mengestimasi Model Ekonometrik Tingkat Kemiskinan di Provinsi

### Sumatera Utara

#### 4.4.1 Model Regresi Linier Berganda

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kuantitatif karena tidak menggunakan skala ukur, pemodelan analisis regresi linier berganda dalam hal ini dilakukan karena penelitian akan menjelaskan hubungan antara TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), AHH (Angka Harapan Hidup), dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) terhadap TK (Tingkat Kemiskinan) di Sumatera Utara. Mengestimasi data dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews 12* berikut ini adalah hasil running data yang telah diolah:

**Gambar 4.6 Hasil Regresi Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara**

Dependent Variable: TK  
 Method: Least Squares  
 Date: 06/13/25 Time: 15:01  
 Sample: 2015 2024  
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.10191	2.327599	12.50297	0.0000
TPT	0.392199	0.206112	1.902847	0.1058
AHH	0.108057	0.056464	1.913725	0.1042
RLS	-3.124540	0.347313	-8.996322	0.0001
R-squared	0.968248	Mean dependent var	8.921000	
Adjusted R-squared	0.952372	S.D. dependent var	1.038198	
S.E. of regression	0.226575	Akaike info criterion	0.157697	
Sum squared resid	0.308018	Schwarz criterion	0.278731	
Log likelihood	3.211517	Hannan-Quinn criter.	0.024922	
F-statistic	60.98771	Durbin-Watson stat	1.583227	
Prob(F-statistic)	0.000069			

Sumber : *Eviews 12* diolah

Maka model ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Dra. Roswita Hafni, 2024) :

$$TK_t = \alpha_0 + \alpha_1 TPT_t + \alpha_2 AHH_t + \alpha_3 RLS_t + \varepsilon_t$$

Dimana :

$TK_t$	= Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara (persen)
$TPT_t$	= Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara (persen)
$AHH_t$	= Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara (tahun)
$RLS_t$	= Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara (tahun)
$t$	= Periode Waktu 2015 - 2024
$\alpha_0$	= Konstanta (intercept)
$\alpha_{1,2,3}$	= Koefisien Variabel Bebas
$\varepsilon_t$	= Error Term

Maka hasil dari estimasi regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$TK_t = 29,10191 + 0.392199 TPT + 0.108057 AHH - 3.124540 RLS + \varepsilon_t$$

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

\*  $\alpha_0 = 29,10191$ , yang berarti bahwa jika semua variabel independen yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berada pada nilai nol, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan sebesar 29,10191 persen. Berdasarkan hasil estimasi, nilai probabilitas untuk koefisien ini adalah 0,0000, yang menunjukkan bahwa nilai konstanta sangat signifikan secara statistik, sehingga keberadaannya dalam model benar-benar diperlukan.

\*  $\alpha_1 = 0.392199$ , artinya jika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat sebesar 1 persen, maka diperkirakan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkat sebesar 0,392199 persen. Hal ini menunjukkan hubungan **positif** antara pengangguran dan kemiskinan. Hasil olahan data

menunjukkan pengaruh variabel ini tergolong kurang signifikan, karena nilai probabilitasnya sebesar 0,1058, yang berarti di tingkat signifikansi 10%.

\*  $\alpha_2 = 0.108057$ , menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 tahun dalam Angka Harapan Hidup (AHH) maka akan meningkatkan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,108057 persen. Hubungan ini bersifat **positif**, karena peningkatan harapan hidup biasanya diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan. Namun, bisa jadi peningkatan AHH belum dibarengi dengan perbaikan ekonomi yang merata, terutama jika beban hidup meningkat pada kelompok usia lanjut. Berdasarkan hasil olahan data, nilai probabilitas untuk variabel ini adalah 0,1042, yang berarti pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan terindikasi kurang signifikan yakni pada tingkat signifikansi 10%.

\*  $\alpha_3 = -3.124540$ , mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 tahun dalam Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar 3,124540 persen. Hubungan ini **negatif** dan kuat, sesuai dengan teori bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam mengurangi kemiskinan karena membuka akses terhadap pekerjaan layak dan pendapatan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil estimasi, variabel ini memiliki nilai probabilitas sangat kecil, yaitu 0,0001, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh RLS terhadap tingkat kemiskinan sangat signifikan secara statistik dan merupakan salah satu faktor dominan dalam model.

## 4.5 Uji Hipotesis

### 4.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel bebas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

- Hipotesis

$H_0 : r_{TPT \rightarrow Q} = 0$  (tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Sumatera Utara).

$H_a : r_{TPT \rightarrow Q} \neq 0$  (terdapat hubungan yang signifikan antara antara jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Sumatera Utara).

- Uji Statistik

$$t_h = \alpha_1 / S_{\alpha_1}$$

$$t_h = 0.392199 / 0.206112 = 1.903484113$$

Dibandingkan dengan t.tabel sebagai berikut :

$$T_{\text{tabel}} = \pm t(\alpha/2, n-k)$$

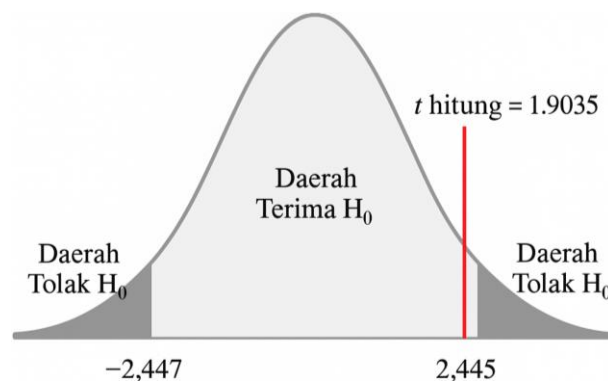
$$= \pm t(5\%/2, 10-4)$$

$$= \pm t(2,5\%, 6)$$

$$= \pm 2.447$$

- Kriteria Uji

Kriteria uji dikatakan terima  $H_0$  jika  $t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ , maka diperoleh  $-2.447 \leq 1.903484113 \leq 2.447$ , karena sesuai dengan kriteria uji maka **terima  $H_0$**  atau dengan menggunakan distribusi kurva normal



- Kesimpulan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) **tidak berpengaruh signifikan** terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2015–2024, dengan nilai p-value sebesar 0.1058 ( $> 0.05$ ). Secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa secara individu, perubahan TPT belum cukup kuat untuk menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan dalam periode tersebut. Sementara secara teori, pengangguran memiliki hubungan langsung dengan kemiskinan, karena seseorang yang tidak bekerja tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu penyebab utama dari ketidaksignifikan ini adalah adanya ketidaksesuaian antara indikator TPT dan realitas ekonomi informal di daerah. TPT hanya menghitung proporsi angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya.

Dalam konteks Sumatera Utara, seperti juga sebagian besar wilayah di Indonesia, jumlah pekerja sektor informal sangat tinggi, mencakup petani, buruh lepas, pedagang kecil, dan sektor informal lainnya. Mereka tidak tercatat sebagai pengangguran, tetapi juga tidak memiliki pendapatan yang stabil maupun jaminan sosial, sehingga rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, penurunan angka TPT tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan, karena belum tentu pekerjaan yang tersedia cukup layak atau menjamin penghidupan yang baik.

Selain itu, selama periode pandemi COVID-19 (2020–2021), terjadi lonjakan pengangguran dan gangguan besar dalam dunia kerja, yang menyebabkan lonjakan TPT ke angka 6,33%. Namun, setelah pandemi mereda, angka TPT mulai menurun secara bertahap hingga mencapai 5,60% pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, namun efek dari pemulihan ini tidak serta-merta menurunkan tingkat kemiskinan, karena kualitas lapangan kerja baru pasca-COVID masih rendah, dan banyak tenaga kerja yang masuk kembali ke sektor informal atau menerima pekerjaan dengan upah rendah. Dalam konteks ini, angka TPT menurun, tetapi kemiskinan tidak otomatis turun sejalan, karena yang membaik hanyalah status formal ketenagakerjaan, bukan daya beli atau kondisi ekonominya.

Di sisi lain, program-program bantuan sosial pemerintah juga bisa mengaburkan hubungan antara TPT dan kemiskinan. Seseorang yang tidak bekerja tetapi menerima bantuan tunai, BLT, atau subsidi, bisa tetap berada di atas garis kemiskinan, sehingga tidak menambah angka kemiskinan meski secara status masih pengangguran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidaksignifikanan TPT terhadap kemiskinan dalam uji parsial bukan berarti TPT tidak penting, tetapi lebih kepada keterbatasan indikator tersebut dalam merepresentasikan kompleksitas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menurunkan angka pengangguran, melainkan juga dengan memastikan kualitas pekerjaan yang layak, peningkatan upah, dan keberlanjutan pendapatan rumah tangga miskin.

## 2. Angka Harapan Hidup (AHH)

- Hipotesis

$H_0 : r_{AHH \rightarrow Q} = 0$  (tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Sumatera Utara).

$H_a : r_{AHH \rightarrow Q} \neq 0$  (terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Sumatera Utara).

- Uji Statistik

$$t_h = \alpha_2 / S_{\alpha_2}$$

$$t_h = 0.108057 / 0.056464 = 1.913630105$$

Dibandingkan dengan t.tabel sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = \pm t (\alpha/2, n-k)$$

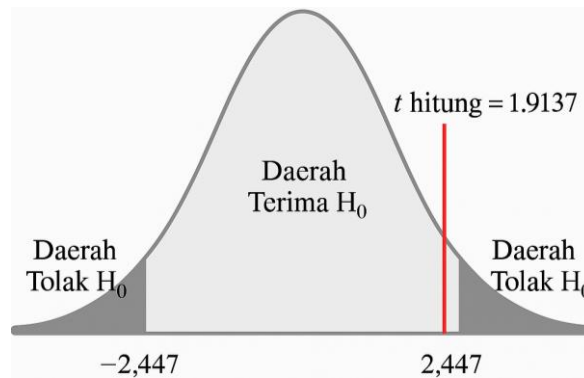
$$= \pm t (5\%, n-4)$$

$$= \pm t (2,5\%, 6)$$

$$= \pm 2.447$$

- Kriteria Uji

Kriteria uji dikatakan terima  $H_0$  jika  $t.tabel \leq t.hitung \leq t.tabel$ , maka diperoleh  $-2.447 \leq 1.913630105 \leq 2.447$ , karena sesuai dengan kriteria uji maka **terima  $H_0$**  atau dengan menggunakan distribusi kurva normal



- Kesimpulan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup (AHH) **tidak berpengaruh signifikan** terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara selama periode 2015–2024, dengan nilai p-value sebesar 0.1042 ( $> 0.05$ ). Hal ini cukup menarik karena secara teori, AHH merupakan indikator penting dalam pembangunan manusia yang seringkali berkorelasi positif dengan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan.

Secara teori, semakin tinggi AHH menunjukkan bahwa masyarakat hidup lebih lama, yang biasanya diiringi oleh perbaikan layanan kesehatan, gizi, sanitasi, dan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, AHH seharusnya menjadi sinyal dari membaiknya kualitas hidup yang pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan kemiskinan. Namun, hasil regresi ini mengindikasikan bahwa peningkatan AHH di Sumatera Utara tidak secara langsung atau signifikan

menurunkan kemiskinan. Terdapat beberapa alasan logis yang dapat menjelaskan hal tersebut.

Pertama, meskipun secara umum AHH di Sumatera Utara menunjukkan tren naik, terjadi anomali tajam pada tahun 2024, di mana AHH justru menurun drastis dari 73,67 tahun menjadi hanya 68,36 tahun. Penurunan sebesar 5 tahun dalam waktu singkat ini merupakan indikasi adanya masalah besar dalam sistem kesehatan masyarakat. Bisa jadi penurunan ini mencerminkan efek sisa dari pandemi COVID-19, seperti meningkatnya angka kematian akibat penyakit tidak menular, keterbatasan layanan kesehatan di wilayah pinggiran, atau kegagalan dalam melakukan pemulihan sistem kesehatan secara menyeluruh. Hal ini tentu saja menyebabkan fluktuasi data AHH menjadi tidak stabil, sehingga berpengaruh terhadap signifikansi statistik dalam model regresi.

Kedua, AHH sebagai indikator makro tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi secara langsung. Misalnya, seseorang bisa hidup lebih lama berkat fasilitas kesehatan dasar, tetapi belum tentu memiliki pendapatan yang cukup untuk hidup di atas garis kemiskinan. Dalam konteks Sumatera Utara, bisa jadi kelompok usia lanjut tetap bertahan hidup lebih lama, tetapi masih berada dalam kategori rentan miskin, khususnya jika mereka tidak memiliki tabungan pensiun, dukungan keluarga, atau jaminan sosial. Oleh karena itu, peningkatan AHH tidak secara otomatis berarti peningkatan kesejahteraan ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan.

Ketiga, AHH sebagai indikator juga sangat dipengaruhi oleh intervensi jangka panjang dan tidak mudah mengalami perubahan drastis dalam jangka waktu pendek. Dalam model regresi yang menggunakan data tahunan selama 10 tahun,

variabel-variabel dengan perubahan lambat seperti AHH kurang responsif dalam menangkap dinamika fluktuatif kemiskinan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, inflasi, maupun bencana ekonomi seperti pandemi.

Selain itu, AHH adalah indikator non-ekonomi yang lebih dekat dengan aspek biologis dan sosial, sehingga efeknya terhadap kemiskinan lebih bersifat tidak langsung. Untuk menjelaskan kemiskinan, variabel yang bersifat ekonomi langsung seperti upah, akses pendidikan, dan pekerjaan cenderung lebih dominan daripada indikator kesehatan.

Secara keseluruhan, meskipun AHH merupakan indikator penting dalam pembangunan manusia, dalam penelitian ini AHH tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini tidak meniadakan pentingnya kesehatan dalam mengatasi kemiskinan, tetapi lebih menunjukkan bahwa pengaruh AHH cenderung tidak langsung, jangka panjang, dan dapat tertutupi oleh dinamika lain seperti inflasi, lapangan kerja, atau bahkan penurunan daya beli.

### 3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

- Hipotesis :

$H_0 : r_{RLS \rightarrow Q} = 0$  (tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Sumatera Utara).

$H_a : r_{RLS \rightarrow Q} \neq 0$  (terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Sumatera Utara).

- Uji Statistik

$$t_h = \alpha_3 / S_{\alpha_3}$$

$$t_h = -3.124540 / 0.347313 = -8.998297565$$

Dibandingkan dengan t.tabel sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = \pm t (\alpha/2, n-k)$$

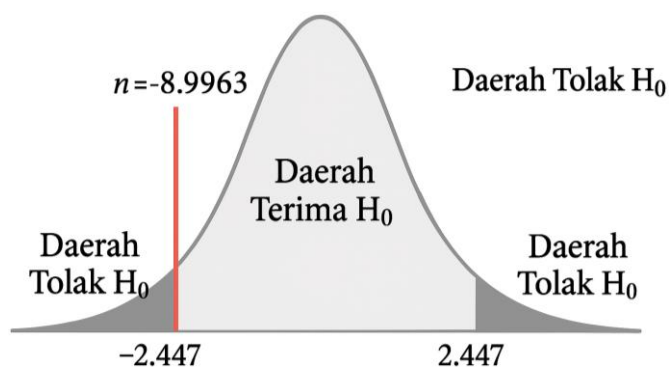
$$= \pm t (5\%, n-4)$$

$$= \pm t (2,6\%, 9)$$

$$= \pm 2.447$$

- Kriteria Uji

Kriteria uji dikatakan terima  $H_0$  jika  $t.\text{tabel} \leq t.\text{hitung} \leq t.\text{tabel}$ , maka diperoleh  $-8.998297565 \leq -2.447$ , karena tidak sesuai dengan kriteria uji maka **tolak  $H_0$**  atau dengan menggunakan distribusi kurva normal



- Kesimpulan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) **berpengaruh negatif dan signifikan** terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien sebesar -3.124540, t-statistic -8.996322, dan nilai p-value sebesar 0.0001 ( $< 0.05$ ). Secara statistik, hasil ini sangat sejalan dengan teori pembangunan dan literatur empiris yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor kunci dalam pengurangan kemiskinan, karena pendidikan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan peluang ekonomi yang lebih besar kepada individu.

RLS mengukur jumlah rata-rata tahun sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Semakin tinggi angka ini, semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh populasi. Dalam konteks Sumatera Utara, data menunjukkan adanya tren peningkatan RLS yang konsisten selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2015, RLS tercatat sekitar 9,10 tahun, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 10,09 tahun. Ini menandakan bahwa secara rata-rata, penduduk Sumatera Utara telah menyelesaikan setidaknya pendidikan hingga jenjang SMA.

Peningkatan ini sangat penting, karena pendidikan formal yang lebih tinggi meningkatkan kemampuan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih produktif dan bergaji lebih tinggi, terutama di sektor formal. Orang dengan pendidikan menengah dan tinggi cenderung memiliki akses ke lapangan kerja yang lebih stabil, peluang usaha yang lebih baik, serta literasi keuangan yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga berkorelasi dengan peningkatan kesadaran terhadap kesehatan, pengelolaan keluarga, serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal. Kombinasi faktor-faktor inilah yang menjelaskan mengapa peningkatan RLS berdampak kuat terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Selain itu, pendidikan memiliki efek jangka panjang yang bersifat turun-temurun. Orang tua yang berpendidikan tinggi cenderung mengutamakan pendidikan anak-anaknya, menciptakan lingkaran kebijakan yang positif dalam keluarga dan masyarakat, sehingga memperkuat daya dorong terhadap mobilitas sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai alat transformatif dalam jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Dalam konteks pasca-pandemi, pendidikan juga terbukti menjadi modal penting untuk beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Banyak sektor ekonomi berpindah ke platform digital, dan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi lebih mampu mengikuti transformasi ini, baik sebagai pelaku usaha daring, pekerja digital, maupun pengguna teknologi produktif.

Signifikansi RLS juga menunjukkan bahwa intervensi pemerintah di bidang pendidikan, seperti wajib belajar 12 tahun, beasiswa, pembangunan sekolah, dan pelatihan vokasional, telah memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas SDM. Ini menjadi bukti bahwa investasi di sektor pendidikan memberikan hasil nyata dalam pengurangan kemiskinan, tidak hanya sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai strategi ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, hasil signifikan dari variabel RLS memperkuat pandangan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan akses pendidikan di seluruh daerah, khususnya daerah terpencil. Pemerintah daerah dan pusat harus memastikan bahwa tidak hanya lebih banyak anak yang sekolah lebih lama, tetapi juga kualitas pengajaran dan keterampilan yang diajarkan mampu mempersiapkan mereka untuk dunia kerja yang semakin kompetitif dan dinamis.

#### 4.5.2 Uji F- Statistic Simultan

- **Hipotesis**

$H_0 : r_{TPT} = r_{AHH} = r_{RLS} = 0$  (tidak ada hubungan secara serentak antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Sumatera Utara).

$H_a : r_{TPT} \neq r_{AHH} \neq r_{RLS} = 0$  (adanya hubungan secara serentak antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Tingkat Kesenakn (TK) di Provinsi Sumatera Utara).

- **Uji Statistik Yang Diperoleh Dari Uji Korelasi F**

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

$$F_{hitung} = \frac{0.968248 / (3 - 1)}{(1 - 0.968248) / (10 - 3)}$$

$$F_{hitung} = 60.9877$$

Dibandingkan dengan F.tabel sebagai berikut :

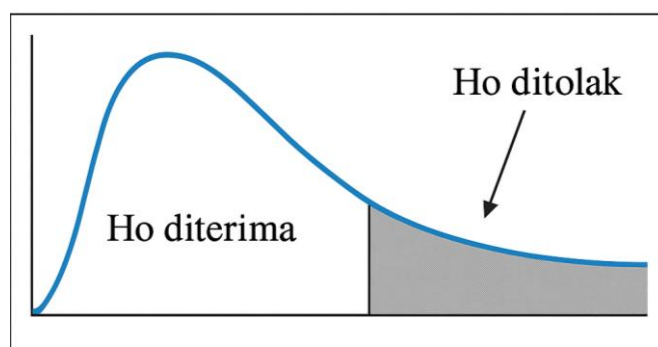
$$F_{tabel} = (\alpha, n-k-1)$$

$$F_{tabel} = (0.05, 3, 6)$$

$$F_{tabel} = 4.7571$$

Kriteria uji terima  $H_0$  jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Hasil menunjukkan nilai  $60.9877 > 4.7571$

Maka keputusan uji adalah tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$ .



4.7511

$F$  —————  $< 60,9877$

- Kesimpulan

Hasil uji F simultan menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 60.9877 lebih besar dari Ftabel sebesar 4.7571, dan nilai Prob(F-statistic) = 0.000069 yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian, **Ho ditolak dan Ha diterima**. Ini berarti variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) **secara simultan berpengaruh signifikan** terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara selama periode 2015–2024.

Artinya, meskipun dalam uji parsial (uji t) hanya variabel RLS yang terbukti signifikan secara individu, namun ketika ketiga variabel dianalisis secara bersamaan, mereka secara kolektif memiliki kontribusi yang bermakna dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan. Hal ini memperlihatkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan oleh interaksi dan akumulasi dari berbagai indikator sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia.

Pada intinya, hasil ini memperkuat pemahaman bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial saja. Sebaliknya, diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan peningkatan kualitas pendidikan (RLS), penurunan pengangguran (TPT), dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat (AHH) agar dampaknya terhadap kemiskinan menjadi lebih signifikan dan berkelanjutan.

Hasil ini juga mencerminkan bahwa meskipun dalam jangka pendek TPT dan AHH belum mampu menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik, namun

keberadaan mereka tetap penting dalam konteks model regresi secara keseluruhan. Ketiganya saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika kemiskinan, di mana pendidikan menjadi fondasi dasar, sementara pekerjaan dan kesehatan menjadi penunjang yang tak terpisahkan dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif.

Dengan demikian, hasil uji F ini mendukung pentingnya kebijakan pembangunan multidimensi yang tidak hanya fokus pada sektor ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah maupun pusat diharapkan mampu merancang program penanggulangan kemiskinan yang tidak bersifat satu arah, melainkan integratif, berbasis data, dan mempertimbangkan ketiga dimensi ini secara bersamaan.

## 4.6 Penaksiran

### 4.6.1 Korelasi (R)

Dari hasil olahan data diatas terlihat bahwa koefisien korelasi secara simultan adalah  $r = \sqrt{2} \cdot 0.968248 = 0.98398$ , menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier yang **sangat kuat dan positif** antara variabel independen (TPT, AHH, dan RLS) secara simultan terhadap variabel dependen (TK) Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015–2024. Nilai  $r = 0.98398$ , menunjukkan nilai mendekati 1, ini juga mencerminkan bahwa model regresi memiliki daya prediksi yang sangat baik, karena hubungan antara variabel-variabel bebas dan terikat sangat kuat secara linier.

#### **4.6.2 Koefisien Determinasi**

Dari hasil olahan data regresi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara terlihat bahwa nilai koefisien determinasinya adalah sebesar 0,968248 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sangat kuat dan andal dalam menjelaskan dinamika tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Nilai R square sebesar 0.968248, dan jika dikalikan 100% maka akan bernilai 96,82%. Artinya sebanyak 96,82% variasi tingkat kemiskinan berhasil dijelaskan oleh ketiga variabel independen yakni hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) secara simultan. Dan hanya sekitar 3,18% sisanya yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak masuk ke dalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.

### **4.7 Pembahasan**

#### **4.7.1 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil estimasi regresi, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, meskipun secara parsial pengaruhnya tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, kenaikan TPT cenderung diikuti oleh kenaikan tingkat kemiskinan, tetapi hubungan ini belum cukup kuat secara statistik. Hal ini dapat disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor

informal. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Utara, yang masih didominasi oleh sektor informal seperti pertanian dan pekerjaan non-formal lainnya, angka TPT tidak sepenuhnya menggambarkan realitas lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Banyak penduduk yang bekerja di sektor informal tidak tercatat secara resmi sebagai pengangguran, sehingga angka TPT tidak sepenuhnya mewakili kondisi pendapatan riil masyarakat.

Temuan ini serupa dengan Fitri, Rismawati Arum & Imron (2023) yang juga menemukan TPT tidak signifikan secara parsial di Kabupaten Solok Selatan. Sementara itu, dalam penelitian Ropikatul Hasanah et al. (2021) di Provinsi Jambi, TPT tidak dijadikan variabel utama, tetapi isu pengangguran tetap dihubungkan secara tidak langsung melalui pengeluaran per kapita dan faktor lain yang signifikan memengaruhi kemiskinan. Namun, berbeda dengan penelitian Yoan Faralin Nugroho et al. (2022) di Jawa Timur, di mana TPT berpengaruh positif signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Perbedaan ini terutama terletak pada struktur perekonomian wilayah. Jawa Timur memiliki basis industri formal yang kuat sehingga indikator TPT lebih akurat mencerminkan jumlah penganggur riil.

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data time series terbaru 2015 - 2024 yang mencakup periode pandemi dan pasca-pandemi, di mana fluktuasi pasar kerja bersifat tidak stabil dan banyak pekerja berpindah ke sektor informal tanpa jaminan pendapatan tetap. Oleh karena itu, hasil ini memperjelas bahwa kebijakan penurunan angka pengangguran harus disertai upaya peningkatan kualitas lapangan kerja formal, perlindungan pekerja informal, dan penataan kembali struktur pasar tenaga kerja agar penurunan pengangguran benar-benar berdampak

pada penurunan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya membaca angka TPT secara kontekstual, dan menunjukkan perlunya perluasan lapangan kerja formal sebagai strategi penanggulangan kemiskinan, bukan hanya menekan angka pengangguran secara statistik.

#### **4.7.2 Pengaruh Angka Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, namun tidak signifikan secara parsial. Secara teori, AHH yang lebih tinggi mencerminkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup yang membaik. Namun, di Sumatera Utara, peningkatan AHH tidak otomatis menurunkan kemiskinan karena tidak selalu diikuti perbaikan ekonomi pada kelompok lansia. Hal ini bisa terjadi karena bertambahnya usia harapan hidup justru menambah beban ekonomi rumah tangga miskin, terutama jika dukungan jaminan sosial untuk lansia belum memadai.

Hasil ini selaras dengan temuan Fitri, Rismawati Arum & Imron (2023), yang menemukan AHH signifikan secara simultan tetapi parsial di daerah Solok Selatan. Sementara, menurut penelitian Ropikatul Hasanah et al. (2021) di Jambi yang mendapati AHH signifikan, tetapi dalam praktiknya perlu dibaca hati-hati karena pengaruhnya jangka panjang dan tidak langsung, di Jambi mendapati AHH berpengaruh signifikan menurunkan kemiskinan, karena di sana didukung pengeluaran per kapita yang lebih stabil. Penelitian Arfa Valiant Kevin et al. (2020) di Jawa Tengah juga menemukan AHH berpengaruh negatif signifikan

terhadap kemiskinan, mendukung teori dasar bahwa kesehatan mendorong kesejahteraan.

Perbedaannya terletak pada periode data dan kondisi wilayah. Penelitian ini menggunakan data terbaru 2015 - 2024, menangkap dampak pandemi dan penurunan AHH drastis di tahun akhir akibat krisis kesehatan. Penelitian lain umumnya menggunakan periode sebelum COVID-19, ketika tren AHH relatif stabil. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa AHH di Sumatera Utara tidak berdiri sendiri sebagai indikator penurun kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti bahwa AHH di Sumatera Utara harus dipadukan dengan kebijakan kesejahteraan ekonomi dan harus disertai kebijakan jaminan sosial lansia agar kontribusinya pada penurunan kemiskinan lebih nyata yang menyoar kelompok usia lanjut.

#### **4.7.3 Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara**

Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi rata-rata lama sekolah penduduk, semakin rendah tingkat kemiskinan. Hasil ini mendukung teori bahwa pendidikan meningkatkan keterampilan dan peluang kerja sehingga menjadi kunci utama dalam membuka akses pekerjaan layak, meningkatkan produktivitas, dan mendorong mobilitas ekonomi.

Penelitian Fitri, Rismawati Arum & Imron (2023) di Solok Selatan juga menemukan RLS signifikan, mendukung temuan ini. Arfa Valiant Kevin et al. (2020) di Jawa Tengah pun menemukan RLS signifikan menekan kemiskinan.

Namun, Ropikatul Hasanah et al. (2021) di Jambi justru menemukan RLS tidak signifikan secara parsial. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh disparitas kualitas pendidikan antar daerah.

Keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu terletak pada rentang data 10 tahun terakhir, tren kebijakan wajib belajar 12 tahun di Sumatera Utara, dan keterhubungannya dengan program-program pendidikan seperti beasiswa daerah. Hasilnya menegaskan bahwa peningkatan RLS di provinsi ini sudah memberikan dampak nyata pada pengurangan kemiskinan. Ini menjadi bukti empiris bahwa kebijakan investasi pendidikan perlu terus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama pengentasan kemiskinan, terutama dengan memperhatikan daerah terpencil yang masih memiliki angka RLS rendah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda mengenai pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015–2024, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan, namun tidak berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor informal, pergeseran pola kerja pasca pandemi COVID-19, serta kurang representatifnya TPT dalam menggambarkan kualitas pekerjaan.
2. Angka Harapan Hidup (AHH) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penurunan tajam AHH pada tahun terakhir dan ketidakmerataan akses layanan kesehatan diduga menjadi penyebab. AHH lebih mencerminkan kualitas hidup jangka panjang, sehingga tidak serta-merta menurunkan angka kemiskinan dalam jangka pendek.
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan satu tahun rata-rata lama sekolah mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam memutus

rantai kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, peluang kerja, dan daya saing individu.

4. Secara simultan (uji F), ketiga variabel independen yaitu TPT, AHH, dan RLS berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, secara bersama-sama, ketiga faktor ini memiliki kontribusi terhadap penurunan atau peningkatan kemiskinan. Ini mencerminkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan multi-sektoral yang saling melengkapi antara sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.
5. Koefisien korelasi (R) sebesar 0. 0.98398 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara ketiga variabel independen terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.968248 menunjukkan bahwa 96,82% variasi kemiskinan di Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 3,18% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dan pusat perlu memperluas dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah pedesaan dan kelompok rentan, karena pendidikan terbukti berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Program wajib belajar, beasiswa, pendidikan vokasi, dan

pelatihan keterampilan harus terus diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

2. Penurunan angka pengangguran harus disertai peningkatan kualitas lapangan pekerjaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pekerjaan yang tersedia memiliki upah layak, jaminan sosial, dan stabilitas kerja agar dapat benar-benar mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada sektor informal yang masih sangat besar.
3. Perbaikan sistem kesehatan dan pemerataan layanan kesehatan perlu menjadi prioritas. Penurunan tajam AHH menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam sistem layanan kesehatan. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan lansia, memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar dan preventif.
4. Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu lintas sektor. Intervensi yang parsial dan tidak terkoordinasi hanya akan berdampak terbatas. Pendekatan multidimensi yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara bersamaan akan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.
5. Penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti pendapatan per kapita, pengeluaran rumah tangga, indeks pembangunan manusia (IPM), atau bantuan sosial, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriliana, S. N., & Wahyudi, S. T. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi Antar Provinsi Di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 44–57. <https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.5>
- Area Institute. (2024). Dampak Pengangguran Terhadap Stabilitas Sosial dan Ekonomi. *Menawan Journal*, ×(×), 220–233.
- Ariefianto, D. M. (2012). *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Erlangga.
- Arvianda, P. N. (2021). Analisis Dampak Pembangunan Ekonomi Inklusif Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 141–155.
- Bandung, Indonesia. <https://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato-Kunci-FPD-JaBar-20190727.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2021, April 30). Indeks Pembangunan Manusia 2020. <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Ketenagakerjaan: Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2024. BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2024/05/06/663c78667a73a388914c19ad/ketenagakerjaan-survei-angkatan-kerja-nasional-februari-2024.html>
- Bappenas. (2020). *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bestari, A. R. (2020, 31 Agustus). Kebijakan Publik DJKN dan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng/baca-artikel/13355/Kebijakan-Publik-DJKN-dan-Ekonomi-yang-Inklusif-dan-Berdaya-Saing.html>
- BPS. (2024). *Booklet Sakernas Februari 2024: Konsep dan Definisi Angkatan Kerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Statistik Pengangguran Indonesia – Konsep dan Definisi TPT*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. [ejournal.unib.ac.id](http://ejournal.unib.ac.id)+15
- BPS. (2016). *Statistik Pengangguran Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chaikin, O., & Usiuk, T. (2019). The imperatives of inclusive economic growth theory. *Scientific Horizons*, 84(11), 3–12.
- Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. London: Longman.
- Daulay, R., Hafni, R., Nasution, S. M. A., Jufrizen, & Nasution, M. I. (2024). Determinants affecting trust, satisfaction, and loyalty: A case study of low-cost airlines in Indonesia. *Innovative Marketing*, 20(1), 101–112.
- Dra. Roswita Hafni, M.S. (2024). *STATISTIKA EKONOMI*

- Edo, M. F. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2018 [Skripsi S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/25355/>
- Elsby, M. W. L., Michaels, R., & Ratner, D. (2015). The Beveridge Curve: A Survey. *Journal of Economic Literature*, 53(3), 571–619. <https://doi.org/10.1257/jel.53.3.571>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hajra, S. (2022). Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam) [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare]. Repository IAIN Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3460/>
- Hariyanto, H. (2019). PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM EKONOMI INKLUSIF. *Jurnal Agenda*, 2(I), 12. <https://core.ac.uk/download/pdf/288296055.pdf>
- Hasibuan, L. S. (2016). Analisis pola pengeluaran rumah tangga miskin di Kabupaten Simalungun. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 16(1). <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i1.1017>
- Hayes, A., Anderson, S. G., & Perez, Y. (2025, Januari 28). What Is Unemployment? Causes, Types, and Measurement. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/u/unemployment.asp>
- Hidayatulloh, I. (2015). KORELASI ANTARA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DENGAN TINGKAT INFLASI DI KABUPATEN JEMBER PERIODE TAHUN 2010 – 2013 [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya. <https://digilib.uinsa.ac.id/3117/>
- Ifrat Research Institute. (2023). Analisis Dampak Pengangguran: Individu dan Masyarakat. *Harmoni Widyakarya Journal*.
- Irhamyah, F. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 45–54. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>
- Katadata. (2023, Agustus 4). Tren Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara Menurun. [Databoks.katadata.co.id. https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/d42ed68c4e43920/tren-jumlah-penduduk-miskin-di-sumatera-utara-menurun](https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/d42ed68c4e43920/tren-jumlah-penduduk-miskin-di-sumatera-utara-menurun)
- Nansadiqa, L. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal HEI EMA*, 3(2), 46–57. <https://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/download/233/172/809>
- OECD & International Labour Organization. (2024). Unemployment rate and labor force definitions. Dalam *Labour economics (definisi pengangguran dan cara perhitungan)*. Diambil dari OECD/ILO literatur online
- Our World in Data. (2025, May 7). Human Development Index. Diakses pada 8 Juni 2025, dari <https://ourworldindata.org/grapher/human-development-index>
- Pemerintah Kota Depok. (2021). Buku Indikator Ekonomi Kecamatan Kota Depok 2019. PPID Kota Depok. [https://ppid.depok.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Buku-Indikator-Ekonomi-Kecamatan-Kota-Depok-2019\\_FINAL](https://ppid.depok.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Buku-Indikator-Ekonomi-Kecamatan-Kota-Depok-2019_FINAL)

- Putra, I. (2019). Pengaruh Pengangguran, Jumlah Penduduk, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. Repository UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13959/>
- Rahayu, S. E. (2019). Analisis multidimensi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(3), 123–137
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 3(2). <https://doi.org/10.30596/ekawan.v3i2.22007>
- Renie, E. (2019). Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Inklusif. *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 10–17. <https://core.ac.uk/download/pdf/288296055.pdf>
- Siddique, H. M. A., Siddique, A., & Ali, A. (2022). Impact of Health on Worker Productivity: Evidence from South Asia. *Bulletin of Business and Economics*. <https://doi.org/10.xxxx/xxxxx> (paper available via MPRA)
- Setyo Tri Wahyudi, S.E.,M.Ec, .Ph.D. (2020). KONSEP DAN PENERAPAN EKONOMETRIKA MENGGUNAKAN E-VIEWS
- Sipota, G. J., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2024). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(1), 1-13. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/download/54603/45836/132680>
- Sitohang, Y. O. (2015). Identifikasi pengangguran sukarela (voluntary unemployment) perempuan di Kabupaten Kepahiang tahun 2015. *Statistika*, 17(1). <https://doi.org/10.29313/jstat.v17i1.2341>
- Todaro, M. P. (2003). *Economic Development*. Pearson Education.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development* (9th ed.). Addison Wesley.
- Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- Tuwajira, N. (2021). Pengangguran dan Klasifikasinya dalam Perspektif Ekonomi Makro. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan*, 19(2), 115–123. <https://doi.org/10.31227/osf.io/z2fvc>
- UNDP. (2010). *Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations—Pathways to Human Development*. New York: United Nations Development Programme. <https://doi.org/10.18356/8bdf990f-en>
- United Nations Development Programme. (2025). *Human Development Index. Human Development Reports*. Diakses pada 7 Juni 2025, dari <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index>
- United Nations Development Programme. (2010). *Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations—Pathways to Human Development*. New York: UNDP. <https://doi.org/10.18356/8bdf990f-en>
- United Nations Development Programme. (2023). *Technical Note 1 – Human Development Index. Dalam Human Development Report 2023/2024 Technical Notes*. HDRO UNDP.

- Widyasanti, A. A. (2019, Juli 27). Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan [Pidato Kunci]. Forum Perencanaan Daerah Jawa Barat.
- Wini, H. (2010). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI WILAYAH PEMEKARAN TINGKAT KABUPATEN (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009) [Skripsi/Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://e-journal.uajy.ac.id/1756/>
- World Health Organization. (n.d.). Human development index. <https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/human-development-index>
- Yuni, A. (2022). Analisis Penanaman Modal Dalam Negeri dan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia [Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25996/>

## LAMPIRAN

### A. Data Mentah Sebelum di Regresi

Tahun	TK	TPT	AHH	RLS
2024	10,79	6,71	68,29	9,1
2023	10,27	5,84	68,33	9,22
2022	9,28	5,6	68,37	9,34
2021	8,94	5,56	68,61	9,51
2020	8,63	5,41	68,95	9,56
2019	9,14	6,91	73	9,71
2018	8,49	6,33	73,1	9,88
2017	8,33	6,16	73,39	10,02
2016	8,15	5,89	73,67	10,04
2015	7,19	5,6	68,36	10,09

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 3879/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/18/12/2023

Kepada Yth.

Medan, 18/12/2023

**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dian Puspita Sari  
NPM : 2005180049  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Masalah yang kompleks dalam implementasi green economy adalah bagaimana mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan stabilitas keuangan negara, dan tingkat kemiskinan.

Rencana Judul : 1. Pendekatan Ekonomi Hijau Dalam Menanggulangi Middle Income Trap Di Kota Tebingtinggi  
2. Langkah Bijak Ekonomi Hijau Dalam Memperkokoh Keuangan Negara Di Tengah Resesi Global 2023  
3. Strategi Green Economy Dalam Menanggulangi Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Kelurahan Tambangan Hulu, Padang Hilir, Kota Tebingtinggi

Objek/Lokasi Penelitian : Kota Tebing Tinggi

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon



(Dian Puspita Sari)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 3879/JDL/SKR/MAN FEB/UMSU/18/12/2023

Nama Mahasiswa : Dian Puspita Sari  
NPM : 2005180049  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis  
Tanggal Pengajuan Judul : 18/12/2023  
Nama Dosen Pembimbing\*) : Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.  
Judul Disetujui\*\*) : Pendekatan Ekonomi Hijau Dalam Menanggulangi  
Middle Income Trap Di Kota Tebing Tinggi

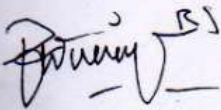
Medan, 19 Desember 2023

Dosen Pembimbing

(Dra. Roswita Hafni, M.Si.)

Disetujui oleh:

Nama Program Studi Ekonomi Pembangunan



(Prawdya Hariani RS., SE., M.Si.)

Dosen Pimpinan Program Studi

Nama Dosen Pembimbing

Disetujui oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah tembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**NOMOR : 1878 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2025**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan  
mohonan judul penelitian Tugas Akhir / Jurnal dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**  
Tgl Tanggal :

gan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/ Jurnal Mahasiswa :

Nama : **Dian Puspita Sari**  
M : **2005180049**  
Penerimaan : **X (Eks)**  
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Dinamika Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara**  
Dosen Pembimbing : **Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.**

gan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir / Jurnal dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Tugas Akhir/ Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir / Jurnal harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 17 Juni 2026 Revisi Judul.....

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 21 Dzulhijjah 1446 H  
17 Juni 2025 M



Dekan




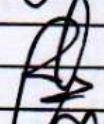

**Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502

Dasan :  
1. Peringgal.



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

**Nama Lengkap** : DIAN PUSPITA SARI  
**NPM** : 2005180049  
**Program Studi** : EKONOMI PEMBANGUNAN  
**Konsentrasi** : RISET EKONOMI DAN BISNIS  
**Judul** : ANALISIS DINAMIKA KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA


Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
17/10-2024	Acc Judul - judul dan di latar belakang - deskripsi masalah - rumus masalah		
23/10-2024	Bab I ✓ Bab II Grand Plan + kerangka - penulisan abstrak - tipe kerangka - hipotesis		
28/10-2024	Bab II ✓ Bab III → Definisi operasional - Analisis data - Model		
13/11-2024	Penyusunan Daftar pustaka & kerangka		
24/11-2024	Acc Seminar proposal		

Medan, Juni 2025

Diketahui /Disetujui  
Plh Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing

  
Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.

  
Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Pada hari ini Jumat, 31 Januari 2025 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi bangunan menerangkan bahwa :


**N a m a** : Dian Puspita Sari  
**N .P.M.** : 200518049  
**Tempat / Tgl.Lahir** : Dolok Masihul / 28 Mei 2000  
**Alamat Rumah** : Soekarno Hatta Perumahan Tambang Permai  
**Judul Proposal** : Analisis Dinamika Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara  
**Disetujui / tidak disetujui \*)**

Item	Komentar
Judul	-
Bab I	Perbaiki identifikasi masalah
Bab II	Tambahkan teori IPM.
Bab III	Perbaiki variabel model.
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Jumat, 31 Januari 2025

**TIM SEMINAR**

  
Ketua  
Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.  
Pembimbing

  
Dra. Roswita Hafni, M.Si.

  
Sekretaris  
Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.  
Pemanding

  
Dra. Lailan Safina Hasibuan M.Si.



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 31 Januari 2025** menerangkan bahwa:

Nama : Dian Puspita Sari  
N .P.M. : 200518049  
Tempat / Tgl.Lahir : Dolok Masihul / 28 Mei 2000  
Alamat Rumah : Soekarno Hatta Perumahan Tambang Permai  
JudulProposal : Analisis Dinamika Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dra.Roswita Hafni, M.Si.*

Medan, Jumat, 31 Januari 2025

**TIM SEMINAR**

Ketua




Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Pembimbing



Dra.Roswita Hafni, M.Si.

Sekretaris



Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

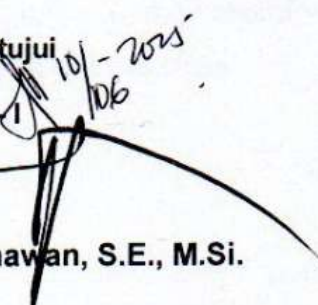
Pemanding



Dra. Lailan Safina Hasibuan M.Si



Diketahui / Disetujui  
A.n. Dekan  
Wakil Dekan I

10/06/2025  


Assoc.Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.

## DAFTAR RIYAWAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Dian Puspita Sari  
NPM : 2005180049  
Tempat & Tanggal Lahir : Dolok Masihul, 28 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Perumahan Tambangan permai  
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

### Nama Orang Tua

Ayah : Ujang  
Ibu : Sumarni  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Perumahan Tambangan permai

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 107462 Dusun 3, Desa Kuta Baru
2. SMP Negeri 2 Tebing Tinggi
3. SMA Negeri 3 Tebing Tinggi
4. Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara